

**STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN WISATA
KULINER MALIOSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU**

(Tesis)

Oleh

Muthidatul Anisa

NPM 2426061008



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2026

**STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN WISATA
KULINER MALIOSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Oleh

Muthidatul Anisa

Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER ADMINISTRASI**

Pada

**Jurusan Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN WISATA KULINER MALIOSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU

**Oleh
Muthidatul Anisa**

Pengelolaan kawasan wisata kuliner berbasis ruang publik menuntut tata kelola yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai aktor dengan tingkat pengaruh yang berbeda. Wisata Kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu berkembang sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat dan UMKM, namun menghadapi dinamika relasi *stakeholder* yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemetaan dan peran *stakeholder* dalam tata kelola Wisata Kuliner Maliosewu menggunakan pendekatan *Power-Interest Grid* serta merumuskan implikasi pengelolaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi dengan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, pengelola, pedagang/UMKM, masyarakat sekitar, dan pengunjung. Analisis dilakukan dengan mengklasifikasikan *stakeholder* ke dalam empat kuadran *Power-Interest Grid*, yaitu *players*, *context setters*, *subjects*, dan *crowd*. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketimpangan antara tingkat kepentingan dan kapasitas pengaruh *stakeholder*. DISPORAPAR Kabupaten Pringsewu berada pada posisi *players* dengan *high power* dan *high interest*, sedangkan DPRD berada pada posisi *context setters* dengan *high power-moderate interest*. Pengelola, pedagang/UMKM, dan masyarakat sekitar menempati posisi *subjects* dengan *low power-high interest*, sehingga menjadi aktor paling terdampak namun paling lemah dalam struktur kebijakan. Pengunjung berada pada posisi *crowd* dengan keterlibatan yang bersifat insidental. Penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan utama tata kelola Maliosewu terletak pada belum seimbangnya relasi kewenangan, kepentingan, dan mekanisme partisipasi, sehingga diperlukan strategi pengelolaan yang diferensiatif dan berorientasi pada keberlanjutan kawasan. Penelitian ini merekomendasikan pelebagaan mekanisme konsultasi dalam setiap keputusan strategis terkait relokasi dan penataan kawasan, penegakan legalitas Maliosewu, serta pembentukan forum koordinasi antara pemerintah daerah dan pengelola guna menciptakan kepastian tata ruang dan meminimalkan konflik antar *stakeholder*.

Kata Kunci: *Stakeholder Mapping, Pengembangan Wisata Kuliner*

ABSTRACT

STAKEHOLDER MAPPING IN THE DEVELOPMENT OF MALIOSEWU CULINARY TOURISM IN PRINGSEWU DISTRICT

**By
Muthidatul Anisa**

The management of a public space-based culinary tourism area requires governance that can accommodate the interests of various actors with different levels of influence. Maliosewu Culinary Tourism in Pringsewu Regency is developing as a center of economic activity for the community and MSMEs, but faces complex stakeholder relationship dynamics. This study aims to analyze the mapping and roles of stakeholders in the governance of Maliosewu Culinary Tourism using the Power-Interest Grid approach and formulate its management implications. This study uses a qualitative approach with a case study method. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving the local government, the Regional People's Representative Council (DPRD), managers, traders/MSMEs, the surrounding community, and visitors. The analysis was conducted by classifying stakeholders into four quadrants of the Power-Interest Grid: players, context setters, subjects, and the crowd. The results of the study indicate an imbalance between the level of interest and the capacity of stakeholder influence. The Pringsewu Regency DISPORAPAR is in the position of players with high power and high interest, while the DPRD is in the position of context setters with high power-moderate interest. Managers, traders/MSMEs, and the surrounding community occupy subjects with low power and high interest, making them the most impacted but weakest actors in the policy structure. Visitors are in the crowd, with incidental involvement. This study concludes that the main problem with Maliosewu governance lies in the imbalanced relationship between authority, interests, and participation mechanisms, necessitating a differentiated management strategy oriented toward the area's sustainability. This study recommends the institutionalization of a consultation mechanism in every strategic decision related to relocation and area planning, confirmation of the legality of Maliosewu, and the establishment of a coordination forum between the local government and managers to create certainty in spatial planning and minimize conflict between stakeholders.

Keywords: Stakeholder Mapping,, Culinary Tourism Development

**Judul Tesis : STAKEHOLDER MAPPING DALAM
PENGEMBANGAN WISATA KULINER
MALIOSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU**

Nama Mahasiswa : Muthidatul Anisa

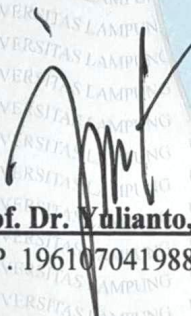
No. Pokok Mahasiswa : 2426061008

Program Studi : Magister Ilmu Administrasi

Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

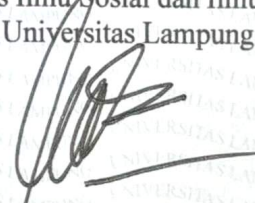
MEYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Yulianto, M.S.
NIP. 196107041988031005


Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.
NIP. 198308152010122002

**2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung**


Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.
NIP. 196908151997032001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Yulianto, M.S.

Sekretaris : Dr. Ani Agus Puspawati, S.AP., M.AP.

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H.

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si
NIP. 197608212000032001

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP. 196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 3 Maret 2026

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Magister), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dicatumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandar Lampung, 10 Maret 2026
Yang membuat pernyataan,



Muthidatul Anisa
Muthidatul Anisa
NPM 2426061008

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Muthidatul Anisa, lahir di Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, pada tanggal 17 Desember 1999. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan Bapak Widodo Ningrohman dan Ibu Yusnita Yani. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 3 Tegalsari, Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2011, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Gadongrejo, Kabupaten Pringsewu yang diselesaikan pada tahun 2015, dan melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) di Negeri 1 Gadingrejo yang diselesaikan pada tahun 2017. Selanjutnya, pada tahun 2017 penulis terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung yang diselesaikan pada tahun 2021. Kemudian pada tahun 2024 juga penulis melanjutkan pendidikan Pascasarjana yang terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Administrasi (MIA) dengan konsentrasi publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung.

MOTTO

“Dalam administrasi publik, tata kelola yang baik lahir dari keseimbangan antara kekuasaan, kepentingan, dan tanggung jawab.

(Penulis)

“Pembangunan yang berkelanjutan hanya terwujud ketika setiap peran memiliki ruang untuk didengar.”

(Penulis)

“Ilmu dicari bukan untuk melahirkan kesombongan, melainkan untuk menumbuhkan kebijaksanaan dan kerendahan hati”

(Penulis)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh Rasa Syukur kepada Allah SWT serta Sanjungan
Kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW Penulis
Mempersembahkan karya ini Kepada Ayahanda, Ibunda, Adik, Suami serta
Anakku Tersayang yang selalu memberikan semangat dan dedikasi yang terbaik
sehingga Penelitian Tesis ini dapat diselesaikan

Almamaterku tercinta

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG**

SANWACANA

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“STAKEHOLDER MAPPING DALAM PENGEMBANGAN WISATA KULINER MALIOSEWU DI KABUPATEN PRINGSEWU”**. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Sains (M.Si) pada Magister Ilmu Administrasi dengan Konsentrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung. Penulis menyadari keterbatasan dan pengetahuan yang dimiliki selama proses penyelesaian Tesis ini, berkat bantuan, bimbingan, motivasi, serta dukungan berbagai pihak, penulis mampu menyelesaikan Tesis ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor UNILA.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana UNILA.
3. Ibu Prof. Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan FISIP UNILA.
4. Bapak Prof. Dr. Yulianto, M.S selaku pembimbing utama, Terimakasih telah memberikan arahan dan bantuannya selama proses penulisan Tesis ini.
5. Ibu Dr. Ani Agus Puspawati, S.A.P., M.A.P selaku dosen pembimbing kedua, terimakasih atas pengarahan dan bantuannya selama proses penulisan Tesis ini.
6. Ibu Dr. Dra. Dian Kagungan, M.H. selaku dosen penguji sekaligus Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi FISIP UNILA yang telah memberikan masukan, saran dan bimbingannya dalam proses penulisan Tesis ini.
7. Kepada kedua orang tuaku Ibu Yusnita Yani dan Bapak Widodo Ningrohman, dan adikku yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan penelitian.

8. Teruntuk suamiku Rodhi Agung Saputra, S.H., M.H. terimakasih atas segala dukungan mental maupun finansial. Terimakasih juga untuk anakku Azeema Agsa Almannaf.

9. Teman-teman MIA 2024 semoga silaturahmi selalu terjalin sampai kapanpun.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata kesempurnaan, namun penulis berharap tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan lebih besar untuk Bapak, Ibu dan teman-teman semua Aamiin.

Bandar Lampung, 28 Februari 2026

Penulis

Muthidatul Anisa

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
MEYETUJUI.....	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR DIAGRAM	xvi
 I. PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	9
1.3. Tujuan Penelitian	9
1.4. Manfaat Penelitian	9
 II. TINJAUAN PUSTAKA.....	 11
2.1. Penelitian Terdahulu	11
2.2. Kebijakan Publik.....	15
2.2.1. Definisi Kebijakan Publik.....	15
2.2.2. Analisis Kebijakan Publik.....	16
2.3. Teori <i>Stakeholder Mapping</i> dalam Analisis Kebijakan	17
2.3.1. Pengertian dan Klasifikasi <i>Stakeholder</i>	17
2.3.2. <i>Stakeholder Mapping</i>	19
2.4. Kerangka Pikir	25

III. METODOLOGI PENELITIAN	27
3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
3.3. Fokus dan Objek Penelitian	28
3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	30
3.5. Teknik Analisis Data	32
3.6. Uji Keabsahan Data	34
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	36
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	36
4.1.1. Profil dan Lokasi Wisata Kuliner Maliosewu	36
4.1.2. Pengelolaan Wisata Kuliner Maliosewu	39
4.1.3. Profil Pedagang dan Produk yang Ditawarkan	42
4.2. Hasil dan Pembahasan	46
4.2.1. Identifikasi <i>Stakeholder</i>	47
4.2.2. Penilaian <i>Power-Interest Stakeholder</i> Wisata Kuliner Maliosewu	60
4.2.3. Klasifikasi dalam Kuadran <i>Power-Intetrest Grid</i>	101
4.2.4. Strategi Pengelolaan Tiap Kuadran	115
V. KESIMPULAN DAN SARAN	127
5.1. Kesimpulan	127
5.2. Saran	128
DAFTAR PUSTAKA	130
LAMPIRAN	136

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Daftar Objek Wisata Kabupaten Pringsewu 2025.....	5
2. Penelitian Terdahulu.....	11
3. Identifikasi Stakeholder.....	49
4. Penilaian Power-Interest Wisata Kuliner Maliosewu	61
5. Dinamika Konflik antar Stakeholder.....	112

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kuadran dalam <i>Power Interest Grid</i>	24
2. Kerangka Pikir <i>Stakeholder Mapping</i> dalam Pengembangan Wisata Kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu	26
3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1994),	32
4. Lokasi Wisata Kuliner Maliosewu	37
5. Wisata Kuliner Maliosewu	38
6. Organisasi Maliosewu	41
7. Kuadran <i>Power-Interest Grid</i>	102

DAFTAR DIAGRAM

Diagram	Halaman
1. Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pringsewu	2
2. Rekapitulasi Jenis Kelamin Pedagang Maliosewu.....	43
3. Asal Domisili Pedagang Maliosewu	44
4. Klasifikasi Produk Kuliner Maliosewu.....	45

I. PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pariwisata merupakan salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi nasional yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat (Fadilla,2024). Pariwisata juga memiliki peran dalam mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perhotelan, dan usaha mikro kecil menengah (UMKM) (Suhel & Bashir,2018). Jika dikembangkan secara optimal, pariwisata dapat menjadi sarana peningkatan perekonomian masyarakat yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (UU Kepariwisataan) menjelaskan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkuat jati diri dan kesatuan bangsa, serta mempererat persahabatan antar bangsa. Salah satu bentuk pariwisata yang menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir adalah wisata kuliner. Wisata kuliner dapat menjadi sarana pelestarian budaya daerah dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui partisipasi Pedagang di dalamnya (Fitriyani,2025).

Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu daerah di Provinsi Lampung yang memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan untuk dikembangkan. Berdasarkan data BPS Kabupaten Pringsewu tahun 2025, angka kunjungan wisatawan tiap tahunnya menunjukkan angka positif dan selalu meningkat (BPS Pringsewu,2025).



Diagram 1. Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Pringsewu

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu, 2025

Dari diagram 1 dapat dilihat bahwa minat kunjungan wisatawan terhadap pariwisata di Kabupaten Pringsewu selalu meningkat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pariwisata di daerah tersebut sangat potensial untuk dikembangkan. Kondisi geografis yang strategis dan kekayaan budaya daerah menjadikan Pringsewu memiliki daya tarik tersendiri sebagai destinasi wisata (Suharsono dkk, 2023). Dalam konteks pengembangan pariwisata, Pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya melalui kebijakan dan program pembangunan berkelanjutan, salah satunya yaitu tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pringsewu tahun 2025 yang mengusung tema "Penguatan Sosial Ekonomi Masyarakat dan Peningkatan Infrastruktur Daerah" yang menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam memprioritaskan pembangunan ekonomi berbasis potensi daerah termasuk sektor pariwisata (Radar Lampung, 2024).

Salah satu destinasi wisata baru yang memiliki potensi besar dalam membangun perekonomian masyarakat adalah wisata kuliner Maliosewu. Wisata kuliner Maliosewu didirikan pada 30 Desember 2023 dan diresmikan oleh PJ bupati pada 1 Januari 2024. Dasar dari penyelenggaraan Maliosewu yaitu Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Pringsewu Nomor 21/435/KPTS/D.15/II/2024. Maliosewu merupakan wisata

kuliner malam yang terinspirasi dari Malioboro Yogyakarta. Destinasi ini menghadirkan nuansa berbeda dalam pariwisata Kabupaten Pringsewu dengan menawarkan pengalaman kuliner yang unik di tengah pemandangan hamparan persawahan yang asri. Lokasi Maliosewu sangat strategis, yaitu di ruas jalan menuju Komplek Pemerintah Kabupaten Pringsewu, tepatnya di Kawasan Tugu Gajah, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, menjadikan Maliosewu mudah diakses oleh masyarakat luas. Konsep wisata kuliner Maliosewu yang mengusung tema Malioboro dengan ciri khas daerah Pringsewu mencerminkan upaya kreatif dalam menciptakan identitas wisata yang unik dan menarik (RRI,2024). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DISPORAPAR, Maliosewu disetujui dan diresmikan karena PJ Bupati memiliki gagasan untuk memperkuat pengembangan UMKM sekaligus menghadirkan destinasi wisata ikonik yang mampu menjadi wadah promosi produk daerah. Pemilihan lokasi Maliosewu juga didasarkan pada pertimbangan strategis, karena berada di jalur lintas barat yang dilalui wisatawan menuju pesisir barat serta berdekatan dengan Tugu Gajah Barbel yang menjadi ikon daerah. Selain itu, panorama hamparan sawah di sekitar lokasi turut menambah daya tarik dan nilai estetika kawasan tersebut (Hasil Wawancara 6 Oktober,2025)

Wisata kuliner Maliosewu menjadi tempat rekreasi sekaligus wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat daerah melalui keterlibatan Pedagang. Pada awal didirikan, Maliosewu menyediakan 56 lapak untuk Pedagang. Namun, seiring dengan berkembangnya kawasan ini, jumlah lapak telah meningkat menjadi 151 unit, yang menampung berbagai jenis usaha kuliner, mulai dari makanan tradisional hingga jajanan kekinian (Radar Lampung,2024). Berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal dengan Ketua Maliosewu, ditemukan bahwa dibalik perkembangan yang cukup pesat, terdapat permasalahan mendasar yang menghambat pengembangan Maliosewu sebagai destinasi wisata yang berkelanjutan. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah rendahnya dukungan dari pemerintah daerah. Minimnya intervensi pemerintah, baik dalam bentuk pembinaan pelaku usaha, pelatihan sumber daya manusia, penyediaan infrastruktur penunjang, maupun upaya promosi yang sistematis, menjadi kendala dalam keberlanjutan potensi

Maliosewu sebagai destinasi wisata unggulan daerah (Hasil Wawancara, 29 Juli 2025).

Kondisi tersebut bertentangan dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 yang menjelaskan bahwa pelaksanaan RIPPARNAS diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dunia usaha, dan masyarakat. Selanjutnya Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pringsewu (RIPPARKAB) Tahun 2020-2025 yang menjelaskan bahwa pembangunan destinasi pariwisata daerah meliputi pembangunan usaha jasa pariwisata, pembangunan fasilitas kepariwisataan, pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan, pembangunan investasi di bidang pariwisata, dan perwilayahan destinasi pariwisata daerah. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa pemerintah daerah memegang peranan strategis dalam mendorong pengembangan destinasi wisata yang merupakan potensi daerah yang dimiliki masing-masing wilayah. Selain itu, peraturan ini juga menegaskan tanggung jawab pemerintah dalam memberdayakan masyarakat melalui dukungan terhadap kegiatan usaha kecil dan mikro, khususnya yang bergerak di sektor pariwisata seperti kuliner dan kerajinan daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan pembinaan, pelatihan, penyediaan infrastruktur, maupun upaya promosi yang sistematis khususnya pada wisata potensial di Kabupaten Pringsewu salah satunya Maliosewu.

Berdasarkan wawancara dengan ketua Maliosewu, rata-rata kunjungan Maliosewu dalam satu malam dapat mencapai 370 kendaraan pengunjung. Selain itu, seiring berjalannya waktu, lapak UMKM di Maliosewu terus bertambah dan meluas sehingga Maliosewu dinilai memberikan kontribusi terhadap perekonomian masyarakat khususnya Pedagang di Maliosewu (Hasil Wawancara, 29 Juli 2025). Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu melakukan pengembangan secara menyeluruh terhadap kegiatan potensial yang dapat mempercepat pembangunan perekonomian daerah khususnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, Maliosewu belum mendapatkan pengakuan

dan dukungan yang sebanding dari pemerintah daerah. Hal ini terlihat dari tidak tercantumnya kawasan ini dalam daftar resmi objek wisata Kabupaten Pringsewu versi BPS 2025 (BPS Pringsewu,2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala DISPORAPAR, tidak tercantumnya Maliosewu dalam daftar objek wisata resmi BPS disebabkan oleh keterbatasan data administratif yang belum dapat dipenuhi oleh pengelola kepada pihak dinas. Hal ini berimplikasi pada tidak terdatanya Maliosewu dalam sistem pendataan wisata nasional (Sisparnas) yang dikelola Kemenparekraf dan BPS, karena sumber data utama masih mengacu pada laporan dari DISPORAPAR (Hasil Wawancara 6 Oktober,2025). Berikut merupakan daftar objek wisata resmi Kabupaten Pringsewu resmi:

Tabel 1. Daftar Objek Wisata Kabupaten Pringsewu 2025

No	Nama Objek Wisata	Kategori	Lokasi
1	Pure Giri Sutra Mandala	Wisata Religi	Mataram, Kec. Gadingrejo
2	Laverna Goa Maria	Wisata Religi	Pajaresuk, Kec. Pringsewu
3	Kolam Renang Griopapan Sewu	Wisata Buatan	Pringsewu Barat, Kec. Pringsewu
4	Rumah Adat Lampung Pesisir	Wisata Budaya	Pardasuka
5	Pendopo	Wisata Budaya	Pringsewu
6	Chandra Department Store	Wisata Belanja	Pringsewu
7	Rest Area Pringsewu	Wisata Kuliner	Wates, Kec. Gadingrejo
8	Rumah Adat Jawa	Wisata Budaya	Wates Timur, Kec. Gadingrejo
9	Sesat Kencana Agung Margakaya	Wisata Budaya	Margakaya, Pringsewu
10	Kolam Renang Intan	Wisata Buatan	Pringsewu
11	Kolam Renang Paris	Wisata Buatan	Pringsewu
12	Taman Hijau Indah Bukit Pongan	Wisata Alam	Kel. Pajaresuk
13	Talang 1000	Wisata Alam	Tegalrejo, Kec. Gadingrejo
14	Kampung Kain Perca	Wisata Budaya	Banyumas
15	Talang Rontok Resort	Wisata Buatan	Bumiratu, Kec. Pagelaran
16	Nggrunjung Pringsewu	Wisata Religi	Pringsewu Selatan, Kec. Pringsewu
17	Jejama Secancangan	Wisata Religi & Edukasi	Pajaresuk, Kec. Pringsewu
18	Puncak Selapan	Wisata Alam	Pekon Selapan, Pardasuka
19	Air Terjun Way Pagasan	Wisata Alam	Pagelaran Utara
20	Bendungan Batu Mas Bumiratu	Wisata Alam	Bumiratu, Kec. Pagelaran
21	Kampung BWI	Agrowisata Buah Naga	Podomoro, Kec. Pringsewu

22	Kolam Renang Margakaya	Wisata Buatan	Margakaya, Kec. Pringsewu
23	Taman Gading Rejo	Wisata Buatan	Gadingrejo
24	Taman Kolam (Bumiratu)	Wisata Buatan	Bumiratu, Kec. Pagelaran
25	Kampung Kerajinan	Wisata Budaya	Pagelaran
26	Bukit Tourism	Wisata Alam	Banyumas
27	Wisata Tulis Tapis	Wisata Budaya	Pringsewu
28	Wisata Puncak Giri Agung	Wisata Alam	Pekon Sukoharjo III Barat
29	Telaga Ngudi Rukun (KKM)	Wisata Buatan	Pekon Sukoharjo I
30	Bendungan Way Gatel	Wisata Alam	Pekon Panjerejo
31	Taman Jomblo	Wisata Buatan	Sriwungu, Kec. Banyumas
32	Taman Intan 76	Wisata Buatan	Kec. Banyumas
33	Bukit Gadingsari	Wisata Buatan	Pekon Bulurejo, Kec. Gadingrejo
34	Taman Edukasi Bukit Wungkal	Wisata Buatan	Pekon Sukoharjo II
35	Saung Cempekak	Wisata Buatan	Pekon Panjerejo
36	Teluk Tembesu	Wisata Alam	Kec. Banyumas
37	Cakra Pesona	Wisata Alam	Pagelaran
38	Kampung Wisata Sekampring Tapis	Wisata Alam	Pekon Lugusari
39	Taman Edukasi Waduk Way Sekampung (JIWK)	Wisata Alam	Pekon Fajarbaru
40	Eco Taman Sari	Wisata Alam	Pekon Pandan Rejo
41	Omah Tawon Mataram (OTM)	Wisata Buatan	Pekon Rejosari, Kec. Adiluwih
42	Wahana 4D	Wisata Buatan	Komplek Rest Area, Jl. Soekarno Hatta, Pringsewu
43	Lembah Akasia / Sumber Sungai Way Sekampung	Wisata Alam Buatan	Pekon Wonodadi, Kec. Gadingrejo
44	Lanakila Lake	Wisata Alam	Pekon Pamenang, Kec. Pagelaran

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu 2025

Dari tabel 1, dapat dilihat bahwa Maliosewu tidak tercantum dalam daftar pariwisata resmi Kabupaten Pringsewu. Keputusan pemerintah daerah yang kurang mendukung Maliosewu secara langsung menimbulkan kekhawatiran bagi pengelola Maliosewu dan para Pedagang. Hal tersebut mengancam keberlangsungan wisata kuliner Maliosewu sebagai destinasi wisata yang potensial (Hasil Wawancara, 29 Juli 2025). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DISPORAPAR Kabupaten Pringsewu terkait alasan pemerintah daerah belum melakukan pembinaan secara aktif pada Maliosewu dikarenakan bahwa wisata kuliner Maliosewu berada pada kawasan yang tidak memenuhi ketentuan penataan ruang, khususnya larangan berjualan di area trotoar. Selain itu, beredar wacana relokasi Maliosewu ke lokasi lain, namun masih tahap ditinjau lebih dalam (Hasil

Wawancara, 12 Agustus 2025). Alasan tersebut didasarkan pada Pasal 3 ayat (3) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima yang menjelaskan bahwa, penetapan lokasi pedagang kaki lima harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah yang ditetapkan oleh Bupati. Namun, berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan Kepala DISPORAPAR, isu relokasi tersebut sebenarnya belum memiliki dasar kebijakan yang jelas dan lebih bersifat rumor yang berkembang akibat perbedaan pandangan politik antara pemangku kepentingan saat ini dengan pihak yang menggagas awal pendirian Maliosewu. Hingga saat ini, belum ada pembahasan formal atau keputusan resmi mengenai relokasi tersebut (Hasil Wawancara 6 Oktober, 2025).

Penyelenggaraan wisata Maliosewu pada dasarnya telah berkoordinasi dengan beberapa pihak yaitu Dinas Koperindag, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan PJ Bupati untuk meninjau kelayakan penyelenggaraan wisata kuliner di tempat tersebut. Karena Maliosewu memenuhi syarat dan tidak mengganggu lalu lintas umum, Maliosewu diresmikan oleh PJ Bupati dengan ketentuan jam operasional yang hanya berlaku dari jam 05.00 sore hingga jam 11.00 malam dan harus menjaga kebersihan agar tidak kumuh (Hasil Wawancara 15 Agustus 2025). Ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi kebijakan pemerintah daerah menjadi hambatan dalam pengembangan Maliosewu. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis yang dapat memberikan pertimbangan terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu terkait pentingnya pembinaan terhadap wisata potensial di daerah yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah. Menurut Nyoman Darma Putra (2014), wisata kuliner merupakan salah satu segmen pariwisata yang paling potensial untuk dikembangkan karena memiliki daya tarik universal yang mampu menarik berbagai segmen wisatawan. Pengembangan wisata kuliner yang berbasis komunitas daerah tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berperan dalam pelestarian budaya kuliner tradisional dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, menurut Pitana & Putra (2013) pariwisata perlu menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat daerah sebagai aktor utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Dalam laporan resminya, *World Organization Tourism UNWTO* (2017 dalam Tovmasyan, 2018) menyebutkan bahwa pariwisata kuliner memiliki

potensi besar dalam membuka lapangan kerja, mendukung usaha mikro dan kecil, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, pengembangan wisata kuliner harus dipandang sebagai strategi dalam pengembangan pariwisata yang kompetitif dan inklusif

Dalam konteks pariwisata Kabupaten Pringsewu, Maliosewu dapat menjadi sarana penggerak ekonomi masyarakat serta dapat mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan jika didukung dan dikembangkan dengan optimal. Dalam sebuah penelitian oleh Stone et.al (2018) menunjukkan bahwa sektor ini mampu meningkatkan pendapatan masyarakat daerah hingga 35% melalui aktivitas perdagangan dan jasa. Selain itu, penelitian oleh Rahayu, Diatmika, dan Haryadi, (2022) di Kabupaten Sumbawa yang mengungkapkan bahwa wisata kuliner berkontribusi terhadap pemberdayaan UMKM melalui peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dan konsumsi langsung di lapangan. Sementara itu, penelitian oleh Wulandari dan Afriyanni (2021) membuktikan bahwa kebijakan pembangunan pariwisata pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau memperkuat infrastruktur, menarik investasi, dan menyokong pertumbuhan ekonomi daerah melalui efek berantai pada aktivitas ekonomi masyarakat. Secara teoritis, pengembangan destinasi wisata kuliner yang didukung kebijakan pemerintah yang tepat dapat menciptakan *multiplier effect* yang signifikan bagi perekonomian daerah.

Gap yang muncul adalah penelitian tersebut secara integratif kurang menganalisis interaksi langsung antara variabel kebijakan pemerintah dan praktik pengembangan wisata kuliner di tingkat mikro, yaitu pada wisata kuliner. Penelitian yang ada cenderung mengkaji dampak secara terpisah atau dalam konteks yang lebih luas. Belum ada penelitian yang secara spesifik mengupas bagaimana bentuk dan implementasi kebijakan pemerintah (seperti insentif fiskal, pelatihan, atau regulasi) secara langsung memengaruhi daya saing, inovasi, dan keberlanjutan wisata kuliner. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk penelitian yang lebih terperinci yang membuktikan adanya dampak positif dan mengidentifikasi mekanisme spesifik di mana kebijakan pemerintah berperan sebagai pendorong untuk memaksimalkan kontribusi wisata kuliner dalam pemberdayaan UMKM.

Pengembangan wisata kuliner merupakan arah strategis dalam pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun, keberhasilan pengembangan tersebut sangat bergantung pada adanya komitmen dan sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah (Khan et al., 2021). Maliosewu sebagai destinasi wisata kuliner potensial di Kabupaten Pringsewu belum berkembang secara optimal karena masih minim pembinaan dan perhatian dari pemerintah daerah. Fenomena ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi ekonomi dengan dukungan kebijakan yang terbatas, di mana ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi menghambat pemberdayaan UMKM, peningkatan pendapatan masyarakat, serta penciptaan lapangan kerja yang seharusnya dapat tumbuh dari sektor ini. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menghadirkan analisis komprehensif mengenai peran dan hubungan antar *stakeholder* dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu, dengan memetakan kepentingan, pengaruh, serta pola interaksi antaraktor yang berperan. Melalui pendekatan kualitatif dan analisis kebijakan publik berbasis *stakeholder mapping*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai arah kebijakan pengembangan Maliosewu yang lebih kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan di masa mendatang.

1.2.Rumusan Masalah

Bagaimanakah *stakeholder mapping* dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu?

1.3.Tujuan Penelitian

Untuk menganalisis *stakeholder mapping* dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu.

1.4.Manfaat Penelitian

a. Secara Teoretis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian analisis kebijakan publik berbasis *stakeholder mapping* pada sektor pariwisata kuliner. Dengan menelaah keterlibatan *stakeholder*, tingkat kepentingan, serta pengaruh mereka terhadap

arah kebijakan, penelitian ini memperkaya teori tentang bagaimana interaksi antaraktor memengaruhi implementasi kebijakan. Temuan penelitian ini dapat memberikan perspektif baru bagi literatur kebijakan publik dan teori *stakeholder*, khususnya terkait peran aktor daerah dalam pembangunan destinasi wisata kuliner berbasis komunitas.

b. Secara Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Pringsewu, khususnya Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR), dalam memahami dinamika hubungan kekuasaan dan kepentingan antar *stakeholder* dalam pengembangan Wisata Kuliner Maliosewu. Melalui hasil pemetaan *stakeholder*, pemerintah daerah dapat memperoleh gambaran mengenai posisi dan peran masing-masing aktor dalam pengelolaan kawasan, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pengembangan destinasi yang lebih terkoordinasi dan responsif terhadap kondisi lapangan. Bagi pengelola Maliosewu dan pedagang/UMKM, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai posisi mereka dalam struktur *stakeholder* serta hubungan dengan aktor lain yang terlibat dalam pengelolaan kawasan. Pemahaman tersebut dapat menjadi referensi dalam memperkuat komunikasi, koordinasi, dan partisipasi dalam proses pengelolaan destinasi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan praktis dalam pengembangan kebijakan pariwisata kuliner berbasis komunitas di tingkat daerah, khususnya dalam memahami pentingnya keseimbangan peran antar *stakeholder* dalam menjaga keberlanjutan destinasi wisata.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pengembangan wisata kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan Tahun	Judul	Metode	Hasil Penelitian	Relevansi dengan Penelitian Ini
1.	Afni, I. N., dkk. (2022)	<i>Stakeholder Mapping dalam Pelaksanaan Community Tourism Collaborative Governance (CTCG) di Desa Maron Wonosobo</i>	Studi kualitatif dengan pendekatan <i>stakeholder mapping</i> dan <i>collaborative governance</i>	Menemukan adanya ketimpangan peran antar <i>stakeholder</i> , di mana pemerintah daerah cenderung dominan, sementara komunitas daerah kurang dilibatkan. Hal ini memicu konflik kepentingan dan menghambat efektivitas pengelolaan wisata desa .	Penelitian ini relevan karena menunjukkan bagaimana dinamika kekuasaan dan hubungan antar <i>stakeholder</i> memengaruhi tata kelola destinasi. Hal tersebut paralel dengan kondisi Maliosewu yang menghadapi tarik menarik kepentingan antara pemerintah daerah, pedagang, dan komunitas daerah.
2.	Wiati, C. B., Indriyanti, S. Y., & Maharani, R. (2018)	<i>Conflict Resolution Efforts through Stakeholder Mapping in Labanan Research Forest, Berau, East Kalimantan, Indonesia</i>	Penelitian menggunakan pendekatan <i>stakeholder mapping</i> untuk mengidentifikasi posisi, kepentingan, dan pengaruh para aktor dalam	Penelitian menunjukkan bahwa pemetaan <i>stakeholder</i> dapat mengidentifikasi distribusi kekuasaan dan kepentingan antar aktor yang terlibat dalam pengelolaan	Penelitian ini relevan karena sama-sama menggunakan pendekatan <i>stakeholder mapping</i> untuk memahami hubungan kekuasaan dan

			konflik pengelolaan kawasan hutan penelitian.	kawasan. Hasil pemetaan tersebut membantu merumuskan strategi penyelesaian konflik serta memperjelas peran masing-masing <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan sumber daya.	kepentingan antar aktor dalam pengelolaan suatu kawasan. Pendekatan ini juga digunakan dalam penelitian Maliosewu untuk mengidentifikasi posisi <i>stakeholder</i> dalam pengembangan wisata kuliner.
3.	Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020)	<i>Stakeholder Collaboration as a Major Factor for Sustainable Ecotourism Development in Developing Countries</i>	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis terhadap kolaborasi <i>stakeholder</i> dalam pengembangan ekowisata di negara berkembang.	Penelitian menemukan bahwa keberhasilan pengembangan destinasi wisata sangat dipengaruhi oleh tingkat kolaborasi antar <i>stakeholder</i> , khususnya antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku usaha. Ketidakseimbangan kekuasaan antar aktor dapat menghambat proses kolaborasi dan memengaruhi keberlanjutan pengelolaan destinasi wisata.	Penelitian ini relevan karena menunjukkan pentingnya keterlibatan dan kolaborasi berbagai <i>stakeholder</i> dalam pengelolaan destinasi wisata. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Maliosewu yang menganalisis hubungan kekuasaan dan kepentingan <i>stakeholder</i> dalam pengembangan wisata kuliner.
4.	Zhang, Y., et.al. (2024)	<i>Factors Influencing the Sustainability of Food Tourism Destinations: Evidence from the World Heritage Site of Guilin</i>	Studi kuantitatif dengan analisis faktor pada destinasi kuliner di Guilin, Tiongkok	Mengidentifikasi enam faktor utama keberlanjutan <i>food tourism</i> : promosi, pengalaman pengunjung, citra destinasi, keterlibatan <i>stakeholder</i> , produk kuliner inti, dan dukungan pemerintah. Kolaborasi antar	Penelitian ini relevan karena menekankan pentingnya keterlibatan <i>multi-stakeholder</i> dan dukungan pemerintah dalam keberlanjutan wisata kuliner. Hal ini dapat

				pihak sangat menentukan keberlanjutan destinasi.	dijadikan pembanding untuk melihat bagaimana Maliosewu bisa tetap berkembang meski dukungan pemerintah minim.
5.	Li, X., el.al. (2022)	<i>Stakeholder Perceptions of Sustainable Tourism Development: A Case Study in Haikou, China</i>	Metode kuantitatif dengan analisis inferensial terhadap persepsi <i>stakeholder</i>	Menganalisis komunikasi internal dan eksternal antar <i>stakeholder</i> , serta pengaruh faktor-faktor seperti pengembangan produk, infrastruktur, dan kesadaran budaya terhadap perkembangan pariwisata berkelanjutan.	Relevan karena menghubungkan persepsi dan kepentingan <i>stakeholder</i> dengan keberlanjutan pariwisata. Studi ini dapat memperkuat kerangka pemikiran Maliosewu dalam melihat peran <i>stakeholder</i> terhadap implementasi kebijakan dan keberlanjutan destinasi.

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2025

Berdasarkan penelitian terdahulu, keterlibatan dan dinamika antar stakeholder merupakan faktor kunci dalam pengelolaan dan keberlanjutan destinasi pariwisata. Afni dkk. (2022) dalam penelitiannya di Desa Maron, Wonosobo, menunjukkan bahwa dominasi pemerintah daerah dan terbatasnya keterlibatan komunitas lokal dapat menimbulkan konflik kepentingan yang melemahkan efektivitas kolaborasi dalam pengelolaan wisata. Penelitian oleh Wiati dkk. (2018) juga menunjukkan bahwa *stakeholder mapping* dapat digunakan untuk mengidentifikasi distribusi kekuasaan dan kepentingan antar aktor sehingga membantu merumuskan strategi penyelesaian konflik dalam pengelolaan kawasan. Selanjutnya, Wondirad dkk. (2020) menegaskan bahwa kolaborasi antar *stakeholder*, terutama antara pemerintah, komunitas lokal, dan pelaku usaha, menjadi faktor penting dalam keberhasilan pengembangan destinasi wisata yang

berkelanjutan. Zhang et al. (2024) di Guilin menunjukkan bahwa keberlanjutan wisata kuliner tidak hanya bergantung pada kualitas produk, tetapi juga pada keterlibatan *stakeholder*, pengalaman pengunjung, citra destinasi, dan dukungan pemerintah. Sementara itu, Li et al. (2022) di Haikou menekankan pentingnya memahami persepsi *stakeholder* dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan agar strategi pengelolaan dapat berjalan lebih inklusif dan efektif.

Gap yang muncul yaitu dalam penelitian terdahulu belum secara spesifik mengkaji dinamika *stakeholder* pada destinasi kuliner berbasis komunitas di tingkat daerah, terutama dalam kondisi minim dukungan pemerintah daerah dan keterbatasan intervensi kebijakan publik. Penelitian Afni dkk. (2022) menunjukkan adanya ketimpangan peran antara pemerintah daerah dan komunitas lokal dalam pengelolaan wisata desa yang dapat memicu konflik kepentingan. Penelitian Wiati dkk. (2018) juga menegaskan bahwa *stakeholder mapping* dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi kekuasaan dan kepentingan aktor dalam konflik pengelolaan kawasan. Sementara itu, Wondirad dkk. (2020) menekankan pentingnya kolaborasi antar *stakeholder* dalam pengembangan destinasi wisata berkelanjutan. Namun demikian, sebagian besar studi masih berfokus pada konteks pengembangan pariwisata secara umum atau wilayah dengan dukungan kebijakan yang relatif kuat, seperti yang ditunjukkan dalam penelitian Zhang et al. (2024) dan Li et al. (2022), sehingga belum secara spesifik menggambarkan bagaimana interaksi antaraktor dalam menjaga keberlanjutan destinasi yang berkembang melalui inisiatif masyarakat di tingkat daerah.

Selain itu, pendekatan *stakeholder mapping* menggunakan *Power Interest Grid (PIG)* belum banyak diterapkan untuk memetakan kekuasaan dan kepentingan aktor dalam pengembangan destinasi kuliner berbasis komunitas. Padahal, model ini penting untuk memahami posisi strategis setiap *stakeholder* serta pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan destinasi. Penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan Maliosewu sebagai studi kasus unik sekaligus menggunakan *stakeholder mapping* berbasis *Power Interest Grid (PIG)* untuk menganalisis hubungan kekuasaan dan kepentingan antaraktor dalam pengembangan destinasi kuliner berbasis komunitas. Penelitian ini tidak hanya menekankan destinasi yang berkembang melalui inisiatif dan partisipasi masyarakat, tetapi juga menjelaskan

bagaimana dinamika kepentingan dan interaksi *stakeholder* memengaruhi efektivitas pengelolaan destinasi di tengah minimnya dukungan kebijakan pemerintah daerah. Dengan demikian, kebaruan penelitian ini terletak pada kombinasi fokus kasus daerah, pendekatan analitis berbasis PIG, dan relevansi terhadap proses kebijakan publik yang belum banyak dikaji dalam literatur pariwisata berbasis komunitas.

2.2. Kebijakan Publik

2.2.1. Definisi Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan pilihan yang diambil oleh pemerintah baik dalam bentuk tindakan maupun pengabaian terhadap suatu isu untuk merespons kebutuhan masyarakat. Thomas R Dye (1998 dalam Tarigan & Huda, 2025) merumuskan secara ringkas bahwa kebijakan publik adalah “apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”, hal ini menunjukkan bahwa keputusan untuk diam juga memiliki konsekuensi yang sama pentingnya seperti intervensi langsung (Dye, 1998 dalam Tarigan & Huda, 2025). Dalam konteks keterbatasan sumber daya dan kompleksitas masalah publik, pemerintah dituntut untuk menentukan prioritas penyelesaian persoalan melalui kebijakan. Secara sederhana, kebijakan publik dapat dipahami sebagai pernyataan formal pemerintah mengenai pilihan terbaik di antara berbagai alternatif penyelesaian masalah publik (Dunn, 2004 dalam Birkland, 2019). Sementara Lemay (2002 dalam Wahab, 2021) memandang kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu yang dilakukan aktor dalam merespons persoalan Friedrich (2007 dalam Howlett, et.al, 2020) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan yang diusulkan untuk menyelesaikan suatu masalah, sedangkan Sharkansky (1970 dalam Suaib, et.al, 2022) menekankan pada fungsi kebijakan sebagai tindakan pemerintah guna mencapai tujuan tertentu. Anderson (1979 dalam Birkland, 2019) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang dipilih secara sengaja oleh seorang atau sekelompok aktor untuk mengatasi masalah.

Dari beberapa uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah cara pemerintah menjawab persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Terkadang jawaban itu hadir dalam bentuk tindakan nyata, tetapi ada kalanya juga

dalam bentuk keputusan untuk tidak bertindak, yang sama-sama membawa konsekuensi penting bagi publik. Karena masalah yang dihadapi selalu beragam sementara sumber daya terbatas, kebijakan publik menjadi upaya memilih jalan terbaik di antara banyak pilihan yang ada.

2.2.2. Analisis Kebijakan Publik

Kebijakan publik berkaitan dengan bagaimana suatu persoalan masyarakat dirumuskan, ditafsirkan, dan dimasukkan ke dalam agenda kebijakan maupun agenda politik. Maka dari itu, analisis dibutuhkan guna menelaah substansi kebijakan, mencakup pemahaman atas masalah yang ingin diatasi serta potensi konsekuensi dari pelaksanaannya (Dunn 2000 dalam LAN, 2015). Analisis kebijakan dapat dipahami sebagai penerapan metode ilmiah oleh seorang analis kebijakan untuk memperoleh data yang kemudian diolah menjadi informasi yang relevan bagi proses perumusan kebijakan. Informasi ini berperan penting dalam mereduksi kerumitan masalah publik menjadi bentuk yang lebih sistematis, sehingga memudahkan penentuan alternatif kebijakan yang tepat untuk diajukan kepada para pengambil keputusan (Parsons dalam LAN, 2015).

Analisis kebijakan publik adalah proses yang lebih dari sekadar memahami apa yang tertulis dalam regulasi ia menuntut pemahaman utuh terhadap bagaimana suatu kebijakan dirumuskan, diimplementasikan, dan akhirnya dievaluasi. Sebagaimana dijelaskan Permana (2024), efektivitas pelaksanaan kebijakan sering kali ternoda oleh kurangnya koordinasi antarlembaga, keterbatasan dana, dan minimnya adaptasi terhadap kondisi daerah (Permana, 2024). Analisis kebijakan adalah ilmu sosial terapan yang menggabungkan beragam teknik dan metode ilmiah untuk menghasilkan informasi berkaitan kebijakan. Meskipun tidak diwajibkan, analisis ini penting untuk memastikan kebijakan yang diambil layak dan berdasarkan pembiayaan yang tepat (Birkland, 2019). Analisis kebijakan membutuhkan instrumen yang lebih sistematis untuk menguraikan kompleksitas proses kebijakan. Instrumen tersebut terwujud dalam bentuk model dan kerangka analisis yang tidak hanya berfungsi menjelaskan dinamika kebijakan, tetapi juga memberikan dasar metodologis bagi peneliti maupun pembuat kebijakan dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi kebijakan secara lebih terarah.

a. Model Kompleks Analisis Kebijakan Publik

Dalam kajian kebijakan publik modern, model analisis dipandang harus mampu menjawab persoalan yang kompleks dengan cara melibatkan berbagai disiplin ilmu, mempertimbangkan konteks objektif, serta menghasilkan rekomendasi yang terstruktur agar relevan dengan sistem pemerintahan yang rumit (Suaib et al., 2022).

b. Pendekatan *Evidence-Based Policy*

Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) menekankan penggunaan data yang valid dan uji empiris dalam setiap tahap perancangan kebijakan: dari pengujian teori efektivitas hingga pengukuran dampak dan analisis faktor eksternal. Model ini banyak mengadopsi kerangka *cost-benefit* dalam menentukan pilihan kebijakan (Lentari, 2024). Dalam praktik kebijakan publik masa kini, analisis biaya-manfaat (*Cost-Benefit Analysis* atau CBA) terus menjadi alat utama dalam mengevaluasi rancangan kebijakan. CBA sangat mempengaruhi para pembuat kebijakan di Uni Eropa, dan penggunaannya dapat meningkatkan kualitas regulasi dengan menegaskan indikator ekonomi secara sistematis (Harcourt, 2018).

Dalam konteks penelitian ini, analisis kebijakan publik menjadi instrumen penting untuk memahami dinamika pengembangan wisata kuliner Maliosewu. Melalui *stakeholder mapping*, analisis kebijakan dapat mengungkap sejauh mana keterlibatan berbagai aktor (pemerintah daerah, Pedagang, komunitas daerah, dan pengunjung) membentuk arah kebijakan, serta faktor apa saja yang mendukung atau menghambat keberlanjutan Maliosewu. Dengan demikian, penerapan analisis kebijakan publik tidak hanya relevan untuk mengidentifikasi minimnya dukungan pemerintah daerah, tetapi juga untuk merumuskan strategi kebijakan yang lebih inklusif, berbasis bukti, dan berorientasi pada keberlanjutan destinasi kuliner Maliosewu.

2.3. Teori *Stakeholder Mapping* dalam Analisis Kebijakan

2.3.1. Pengertian dan Klasifikasi *Stakeholder*

Stakeholder adalah konsep yang awalnya muncul dari teori manajemen, kemudian berkembang luas ke dalam kajian administrasi publik dan kebijakan. Freeman (1984 dalam Richter & Dow, 2017) mendefinisikan *stakeholder* sebagai

“individu atau kelompok yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi.” Definisi klasik ini menekankan dua arah relasi: *stakeholder* bukan hanya objek kebijakan, melainkan juga subjek yang mampu memengaruhi jalannya kebijakan (Freeman, 1984 dalam Richter & Dow, 2017). Dalam konteks kebijakan publik, *stakeholder* dipahami sebagai aktor yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung terhadap proses perumusan dan implementasi kebijakan. Menurut Bryson, memahami siapa *stakeholder* dan apa kepentingan mereka adalah langkah awal untuk mengurangi konflik serta memperbesar peluang keberhasilan kebijakan (Bryson, 2018).

Secara konseptual, *stakeholder* memiliki dinamika kepentingan dan kekuatan yang bisa berubah sesuai konteks politik, sosial, maupun ekonomi. Reed et al. (2018) menjelaskan bahwa analisis *stakeholder* kini dipakai sebagai alat strategis untuk menilai relasi kekuasaan, potensi kolaborasi, serta risiko konflik di dalam implementasi kebijakan publik (Reed et.al, 2018). Dengan demikian, *stakeholder* dalam penelitian Maliosewu bukan hanya pemerintah daerah, tetapi juga pedagang, pengelola, masyarakat daerah, bahkan konsumen yang datang. Pemetaan siapa mereka dan bagaimana kepentingan serta pengaruhnya akan menjadi kunci dalam memahami dinamika kebijakan publik yang mengatur keberlanjutan Maliosewu. Dalam memahami *stakeholder*, perlu ada klasifikasi untuk membedakan tingkat kepentingan dan pengaruh masing-masing aktor. Mitchell, Agle, dan Wood (1997 dalam Wiati dkk, 2018) memperkenalkan model yang populer hingga kini, yaitu klasifikasi berdasarkan *power*, *legitimacy*, dan *urgency*. Menurut mereka, kombinasi ketiga dimensi inilah yang menentukan seberapa besar perhatian yang harus diberikan pada suatu *stakeholder*. Sementara itu, Bryson (2018) mengembangkan kerangka *power interest matrix*, yang mengelompokkan *stakeholder* ke dalam empat kategori: mereka yang perlu dipantau, dijaga informasinya, dijaga kepuasannya, dan yang harus dikelola secara dekat. Alat ini banyak digunakan dalam perencanaan strategis sektor publik karena praktis untuk memetakan posisi aktor dan strategi pengelolaannya (Bryson, 2018).

Dengan merujuk pada teori *stakeholder mapping* diatas dapat dipahami bahwa pemetaan *stakeholder* berfungsi untuk memvisualisasikan aktor yang terlibat dan juga sebagai instrumen strategis untuk membaca dinamika kepentingan, pengaruh, dan relasi kekuasaan yang membentuk jalannya suatu kebijakan. Dalam konteks penelitian Maliosewu, *stakeholder mapping* diposisikan sebagai alat analisis yang penting untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat, seberapa besar kepentingan dan pengaruh mereka, serta bagaimana hubungan antar pihak terbentuk. Hal ini sangat relevan untuk konteks Maliosewu, di mana persoalan utamanya dipicu oleh lemahnya dukungan pemerintah daerah, adanya wacana relokasi yang menimbulkan resistensi, serta perbedaan kepentingan antara pedagang, Pedagang, masyarakat sekitar, dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan *stakeholder mapping* sebagai kerangka analisis utama untuk menelaah bagaimana dinamika hubungan antaraktor tersebut memengaruhi arah pengembangan Maliosewu.

2.3.2. Stakeholder Mapping

Stakeholder mapping merupakan teknik untuk memvisualisasikan siapa saja aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan, sekaligus menggambarkan hubungan antar mereka berdasarkan kepentingan dan pengaruh. Bryson (2018) menekankan bahwa pemetaan ini membantu peneliti maupun pembuat kebijakan untuk “melihat siapa yang harus dilibatkan lebih dekat, siapa yang cukup dipantau, dan bagaimana membangun strategi komunikasi yang berbeda bagi setiap kelompok” (Bryson, 2018). Terdapat berbagai model dalam pemetaan *stakeholder* yang dapat digunakan untuk memahami posisi, kepentingan, dan pengaruh aktor-aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan atau proyek. Setiap model dikembangkan oleh para ahli dengan pendekatan yang berbeda sesuai kebutuhan analisis. Penggunaan model ini bertujuan agar proses pengambilan keputusan lebih terarah, partisipatif, serta mampu meminimalkan konflik di antara para pihak (LAN,2015). Berikut dipaparkan beberapa model pemetaan *stakeholder* yang umum digunakan dalam studi kebijakan publik.

a. Stakeholder Issue Interrelationship Diagram

Model ini memetakan keterkaitan *stakeholder* dengan isu kebijakan tertentu. Melalui pemetaan ini, dinamika koalisi maupun konflik dapat diungkap

sehingga pembuat kebijakan lebih siap menghadapi dukungan maupun resistensi. Dengan demikian, model ini bermanfaat untuk membaca peta politik kebijakan secara lebih realistis. Adapun langkah-langkah dalam pemetaan *stakeholder issue interrelationship diagram*:

1. Mengidentifikasi isu kebijakan utama yang menjadi sorotan.
2. Menentukan *stakeholder* yang terhubung dengan isu tersebut.
3. Menyusun hubungan *stakeholder* isu dalam bentuk diagram.
4. Menggambarkan apakah hubungan itu berupa dukungan, penolakan, atau netral.
5. Menganalisis potensi koalisi dan konflik antaraktor.

b. *Problem-Frame Stakeholder Maps*

Model ini menekankan bahwa perbedaan sikap *stakeholder* sering muncul karena perbedaan cara mereka membingkai masalah. Dengan memahami *frame* tiap aktor, analis dapat mengidentifikasi akar konflik sekaligus menemukan titik temu. Manfaat utamanya adalah meningkatkan kualitas komunikasi kebijakan dan menghasilkan keputusan yang lebih inklusif. Adapun langkah-langkah dalam pemetaan *stakeholder model problem-frame stakeholder maps*:

1. Menentukan masalah kebijakan utama yang menjadi fokus.
2. Mengidentifikasi *stakeholder* yang relevan.
3. Mencatat cara masing-masing *stakeholder* mendefinisikan masalah (ekonomi, sosial, birokrasi, dan lingkungan).
4. Membuat peta visual yang menunjukkan perbedaan frame antaraktor.
5. Menganalisis pengaruh perbedaan frame terhadap sikap dan posisi *stakeholder*.
6. Menyusun strategi komunikasi yang mampu menjembatani perbedaan frame.

c. *Policy Implementation Mapping*

Bryson pada tahun 2004 memperkenalkan model ini untuk menelusuri aktor kunci dalam implementasi kebijakan dan titik rawan kegagalannya. Model ini fokus pada tahap implementasi kebijakan, dengan menekankan siapa saja aktor yang benar-benar berperan di lapangan. Dengan memetakan jaringan

implementasi, hambatan koordinasi dan tumpang tindih kewenangan dapat diantisipasi lebih awal. Manfaatnya adalah memastikan kebijakan yang dirumuskan bisa dijalankan secara efektif dan mencegah kegagalan akibat lemahnya koordinasi antaraktor. Adapun langkah-langkah dalam pemetaan *stakeholder model policy implementation mapping* (LAN,2015).

1. Mengidentifikasi kebijakan yang akan diimplementasikan.
2. Menentukan aktor kunci yang terlibat dalam pelaksanaan.
3. Menentukan peran tiap aktor (pengambil keputusan, pelaksana, pengawas, penerima manfaat).
4. Membuat peta jaringan hubungan antaraktor dan jalur koordinasinya.
5. Mengidentifikasi hambatan potensial dalam implementasi.
6. Menyusun strategi perbaikan agar implementasi berjalan efektif.

d. *Power vs. Interest Grid* (PIG)

Model ini diperkenalkan oleh Mendelow pada 1991 untuk mengelompokkan *stakeholder* berdasarkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kekuasaan (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*). Model ini sangat berguna ketika ada perbedaan kepentingan atau potensi konflik, karena membantu peneliti atau pembuat kebijakan menentukan strategi komunikasi yang berbeda untuk tiap kelompok (LAN,2015). Menurut Eden & Ackermann (1998) (dalam LAN,2015), *stakeholder* dikelompokkan menjadi *crowd*, *subjects*, *context setters*, dan *players*. Sementara itu, Mintzberg (1999) (dalam LAN,2015) menggunakan istilah *Minimal Effort*, *Keep Informed*, *Keep Satisfied*, dan *Key Players* yang lebih aplikatif dalam menentukan strategi pengelolaan. *Crowd* adalah pihak dengan kekuasaan dan kepentingan rendah sehingga cukup dipantau, *Context Setters* memiliki kekuasaan tinggi namun kepentingannya kecil, sehingga perlu dijaga kepuasannya agar tidak menghambat, *Subjects* adalah mereka yang berkepentingan besar tetapi lemah dalam kekuasaan, sehingga harus diberi informasi dan dilibatkan. Sementara itu, dan *Players* adalah aktor kunci dengan kekuasaan dan kepentingan tinggi yang harus dikelola secara dekat karena perannya sangat menentukan keberhasilan kebijakan. Adapun langkah-langkah dalam melakukan *stakeholder mapping*

dalam model *power interest grid*. Berikut merupakan langkah-langkah *Stakeholder Mapping* menurut Johnson, Scholes & Whittington (2008):

1. Identifikasi *stakeholder*

Langkah pertama adalah menyusun daftar aktor yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Identifikasi dilakukan baik terhadap *stakeholder* primer maupun sekunder.

2. Penilaian *power & interest*

Setiap *stakeholder* dinilai berdasarkan tingkat kekuasaan (*power*) yang mereka miliki untuk memengaruhi kebijakan, serta tingkat kepentingan (*interest*) mereka terhadap keberlanjutan destinasi. *Power* dapat berupa kewenangan formal, akses terhadap sumber daya, atau kemampuan memengaruhi opini publik. Sedangkan *interest* mengacu pada sejauh mana kepentingan *stakeholder* akan terdampak oleh keberhasilan atau kegagalan destinasi.

3. Klasifikasi dalam kuadran

Menurut Mendelow (1991) (dalam LAN,2015), tujuan utama pemetaan ke dalam kuadran adalah menentukan strategi pengelolaan yang berbeda untuk tiap kelompok *stakeholder*. Menempatkan *stakeholder* dalam *Power–Interest Grid*, yang terdiri atas empat kuadran menurut Eden & Ackermann (1998) (dalam LAN,2015) sebagai berikut :

a) *Crowd (Low Power, Low Interest)*

Yaitu aktor dengan kekuatan terbatas dan kepentingan rendah. Langkah yang harus dilakukan yaitu cukup dipantau.

b) *Subjects (Low Power, High Interest)*

Yaitu *stakeholder* dengan kepentingan besar, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan. Langkah yang perlu dilakukan yaitu selalu diberi informasi agar tetap mendukung, bahkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan partisipasi.

c) *Context Setters (High Power, Low Interest)*

Yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuasaan cukup besar, namun kepentingannya terhadap isu relatif rendah.

d) *Players (High Power, High Interest)*

Yaitu aktor strategis yang memiliki kekuasaan tinggi sekaligus kepentingan besar.

4. Strategi pengelolaan tiap kuadran

Menentukan pendekatan komunikasi dan keterlibatan yang sesuai untuk setiap kategori:

a) *Crowd (Low Power, Low Interest)*

Cukup dilakukan pemantauan (*monitoring*) secara periodik, tanpa harus mengalokasikan sumber daya manajerial yang berlebihan. Komunikasi bersifat informatif dan sederhana, misalnya melalui sosialisasi umum atau publikasi media massa.

b) *Subjects (Low Power, High Interest)*

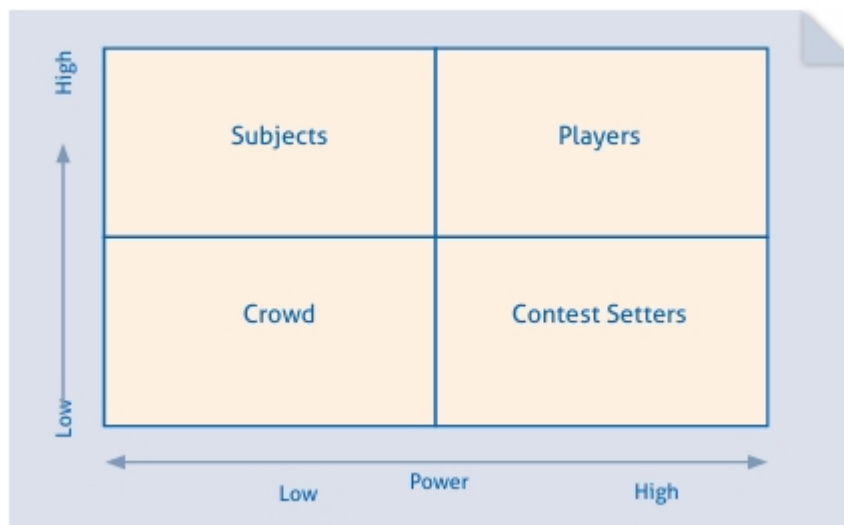
Mereka perlu diberikan informasi yang rutin dan akurat agar tetap mendukung. Selain itu, dapat diberdayakan melalui forum partisipatif atau kelompok kerja sehingga suara mereka tetap tersalurkan. Dengan demikian, walaupun tidak memiliki kekuasaan formal, mereka dapat menjadi sekutu strategis yang memperkuat legitimasi kebijakan.

c) *Context Setters (High Power, Low Interest)*

Penting untuk menjaga kepuasan mereka agar tidak menimbulkan resistensi. Pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi selektif dengan menekankan aspek yang sesuai dengan agenda mereka.

d) *Players (High Power, High Interest)*

Kuadran ini perlu dikelola secara dekat (*manage closely*) melalui komunikasi intensif, pelibatan langsung dalam pengambilan keputusan, dan kerjasama formal. Hubungan dengan kelompok ini tidak bisa bersifat parsial, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan.



Gambar 1. Kuadran dalam *Power Interest Grid*

Sumber : Lembaga Administrasi Negara. (2015).

Dari berbagai model diatas, model yang banyak digunakan adalah *power interest grid*, di mana *stakeholder* dikategorikan berdasarkan tingkat kepentingan terhadap isu dan tingkat kekuasaan atau pengaruh yang dimiliki. Model ini sederhana, tetapi mampu memberi gambaran praktis tentang posisi setiap aktor, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas manajemen *stakeholder* (Atmajaya,2025). Berdasarkan relevansi dengan topik penelitian, *Power Interest Grid* dipilih sebagai model yang digunakan untuk pemetaan *stakeholder*. Model yang diperkenalkan oleh Mendelow (1991 dalam LAN,2015) ini menilai aktor berdasarkan dua dimensi kunci, yakni tingkat kekuasaan (*power*) dan kepentingan (*interest*), kemudian mengelompokkannya ke dalam empat kategori: *crowd*, *subjects*, *context setters*, dan *players*. Kategori ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi secara sistematis aktor kunci yang harus dilibatkan secara intensif, aktor berpengaruh yang kepuasannya perlu dijaga, kelompok berkepentingan tinggi yang perlu terus diinformasikan, serta pihak dengan peran kecil yang cukup dipantau.

Model *power interest grid* ini sangat relevan diterapkan dalam konteks Wisata Kuliner Maliosewu yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan beragam, mulai dari pemerintah daerah, Pedagang, komunitas daerah, hingga wisatawan. Dalam praktiknya, perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan

yang tidak seimbang kerap menimbulkan potensi konflik, misalnya ketika prioritas pemerintah tidak selaras dengan kebutuhan masyarakat daerah atau Pedagang. PIG memberikan kerangka analisis yang jelas untuk membaca dinamika tersebut, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap aktor terdampak langsung. Dengan pertimbangan tersebut, penggunaan PIG dalam penelitian ini diharapkan mampu memperlihatkan peta kepentingan yang lebih akurat, mengidentifikasi potensi konflik sejak awal, serta mendukung formulasi kebijakan pariwisata kuliner Maliosewu yang berkelanjutan.

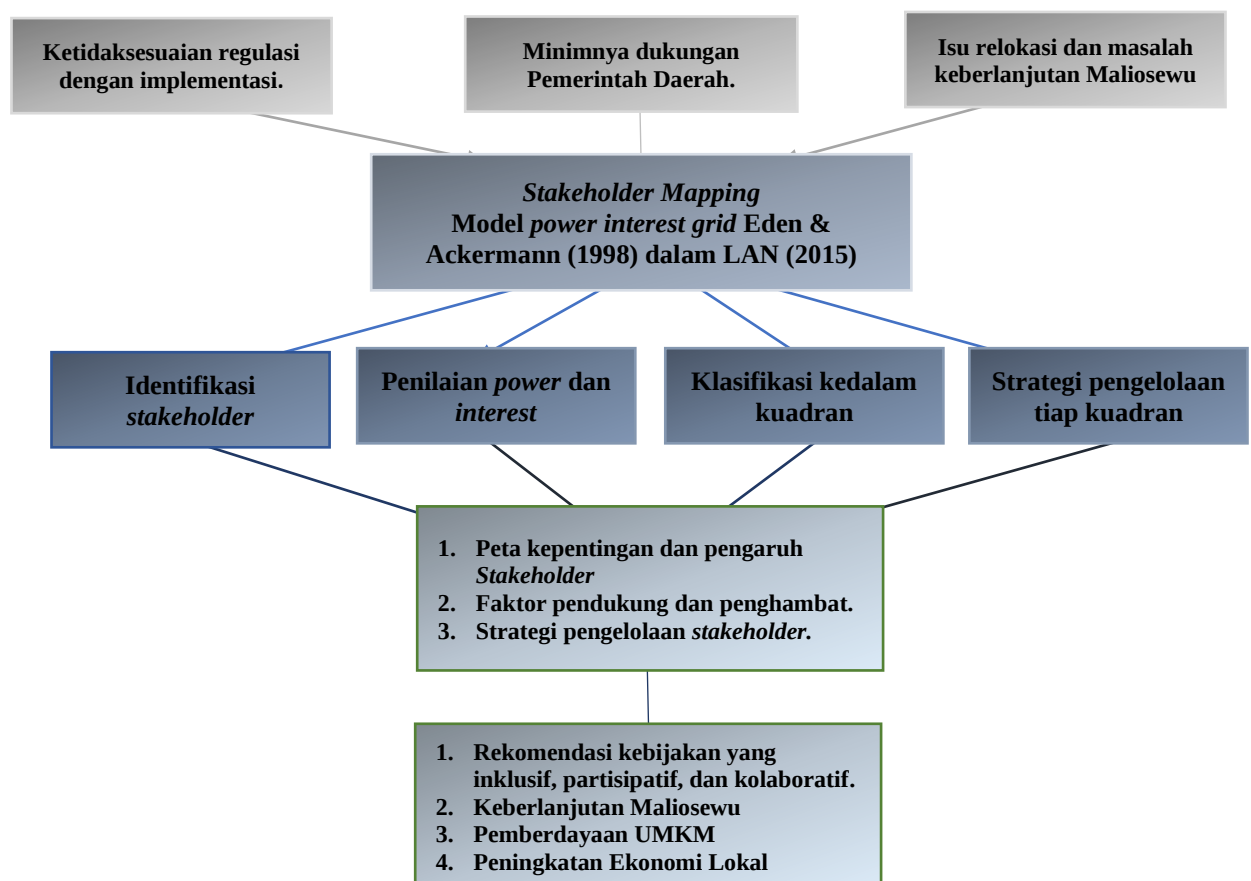
2.4. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir penelitian adalah alur pemikiran yang menjelaskan hubungan antarvariabel yang diteliti, disusun berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, sehingga memperjelas arah penelitian (Sugiyono, 2019). Kerangka berpikir penelitian ini menjelaskan bagaimana dinamika *stakeholder* dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu. Melalui kerangka ini, penelitian bertujuan untuk menghasilkan peta kepentingan dan pengaruh *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan Maliosewu, sekaligus mengidentifikasi potensi konflik maupun peluang kolaborasi antaraktor. Output dari analisis ini akan memberikan dasar bagi perumusan kebijakan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian ini menekankan bahwa *stakeholder mapping* merupakan instrumen strategis untuk menjembatani kesenjangan antara regulasi dan implementasi, serta untuk mendorong keberlanjutan Maliosewu, pemberdayaan UMKM, dan peningkatan ekonomi daerah. Kerangka pikir ini menjelaskan keterkaitan logis antara komponen penelitian sebagai berikut:

- a. *Input*, yaitu ketidaksesuaian regulasi dan implementasi (Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (RIPPARNAS) Tahun 2010-2025 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Pringsewu (RIPPARKAB) Tahun 2020-2025), minimnya dukungan pemerintah daerah, isu relokasi, dan ancaman keberlanjutan UMKM di Maliosewu.

- b. Proses, yaitu *mapping stakeholder* dengan menggunakan model *Power Interest Grid* Eden & Ackermann (1998) dalam (LAN,2015) dengan langkah-langkah menurut Johnson, Scholes & Whittington (2008) yang meliputi identifikasi aktor, klasifikasi kepentingan dan pengaruh, klasifikasi kedalam kuadran, serta strategi pengelolaan tiap kuadran.
- c. *Output*, yaitu peta kepentingan dan pengaruh *stakeholder*, faktor pendukung dan penghambat, serta strategi pengelolaan *stakeholder*.
- d. *Outcome*, yaitu rekomendasi kebijakan publik yang lebih inklusif, partisipatif, dan kolaboratif, guna menjamin keberlanjutan Maliosewu sebagai destinasi kuliner berbasis komunitas dan mendorong pemberdayaan UMKM daerah.

Berikut merupakan kerangka pikir dari penelitian ini:



Gambar 2. Kerangka Pikir Stakeholder Mapping dalam Pengembangan Wisata Kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu

Sumber : Diolah Oleh Peneliti,2025

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami fenomena sosial secara mendalam melalui perspektif para aktor yang terlibat (Creswell & Poth, 2018). Tipe deskriptif digunakan untuk menggambarkan siapa saja *stakeholder* dalam pengembangan Maliosewu beserta kepentingan dan pengaruhnya, sedangkan tipe eksploratif digunakan untuk menelusuri dinamika relasi antaraktor, potensi konflik, serta peluang kolaborasi. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola hubungan yang terbentuk melalui *stakeholder mapping*. Menurut Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif cocok untuk mengkaji isu-isu kompleks yang membutuhkan pemahaman mendalam terhadap pengalaman, makna, dan perspektif para aktor yang terlibat secara langsung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada kawasan wisata kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu. Studi kasus dipandang relevan karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis dinamika kebijakan dan relasi *stakeholder* dalam konteks nyata, melalui pengumpulan data dari berbagai sumber seperti wawancara, observasi, dan dokumen resmi. Yin (2018) menegaskan bahwa studi kasus sangat tepat digunakan ketika fokus penelitian adalah pada pertanyaan “bagaimana” dan “mengapa” dalam situasi sosial yang kompleks, serta ketika peneliti tidak memiliki kendali langsung atas peristiwa yang diteliti.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dengan objek kajian pada kawasan wisata kuliner Maliosewu yang memiliki potensi strategis namun menghadapi dinamika kebijakan publik yang kompleks. Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama 2 bulan, mencakup kegiatan

pengumpulan data primer dan sekunder untuk memetakan *stakeholder* yang terlibat, menganalisis kepentingan serta pengaruh masing-masing aktor, dan memahami dinamika hubungan mereka dalam proses pengembangan Maliosewu.

3.3. Fokus dan Objek Penelitian

Fokus penelitian ini diarahkan pada pemetaan *stakeholder* dalam proses pengembangan dan keberlanjutan wisata kuliner Maliosewu di Kabupaten Pringsewu. Tujuannya adalah untuk memahami siapa saja aktor yang terlibat, bagaimana tingkat kepentingan (*interest*) dan pengaruh (*power*) mereka, serta bagaimana dinamika hubungan antaraktor tersebut memengaruhi arah kebijakan dan keberlanjutan Maliosewu. Permasalahan utama yang menjadi dasar penelitian ini adalah ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi kebijakan di lapangan, minimnya dukungan pemerintah daerah, serta wacana relokasi yang menimbulkan ketidakpastian keberlanjutan destinasi.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan kerangka *stakeholder mapping* dengan model *Power Interest Grid* Eden & Ackermann (1998) (dalam LAN, 2015). Model ini dipilih karena sederhana namun efektif dalam memberikan gambaran praktis tentang posisi setiap aktor, sehingga memudahkan dalam menentukan prioritas manajemen *stakeholder*. Langkah-langkah analisis *stakeholder* dalam penelitian ini mengacu pada langkah-langkah *Stakeholder Mapping* menurut Johnson, Scholes & Whittington (2008):

a. Identifikasi *stakeholder*

Langkah pertama adalah menyusun daftar aktor yang memiliki keterkaitan dengan isu yang diteliti. Identifikasi dilakukan baik terhadap *stakeholder* primer maupun sekunder.

b. Penilaian *power & interest*

Setiap *stakeholder* dinilai berdasarkan tingkat kekuasaan (*power*) yang mereka miliki untuk memengaruhi kebijakan, serta tingkat kepentingan (*interest*) mereka terhadap keberlanjutan destinasi. *Power* dapat berupa kewenangan formal, akses terhadap sumber daya, atau kemampuan memengaruhi opini publik. Sedangkan *interest* mengacu pada sejauh mana kepentingan *stakeholder* akan terdampak oleh keberhasilan atau kegagalan destinasi.

c. Klasifikasi dalam kuadran

Menurut Mendelow (1991) dan LAN (2015), tujuan utama pemetaan ke dalam kuadran adalah menentukan strategi pengelolaan yang berbeda untuk tiap kelompok *stakeholder*. Menempatkan *stakeholder* dalam *Power–Interest Grid*, yang terdiri atas empat kuadran menurut Eden & Ackermann (1998) (dalam LAN, 2015) sebagai berikut:

1. *Crowd (Low Power, Low Interest)*

Yaitu aktor dengan kekuatan terbatas dan kepentingan rendah. Langkah yang harus dilakukan yaitu cukup dipantau.

2. *Subjects (Low Power, High Interest)*

Yaitu *stakeholder* dengan kepentingan besar, tetapi tidak memiliki pengaruh signifikan. Langkah yang perlu dilakukan yaitu selalu diberi informasi agar tetap mendukung, bahkan dapat diberdayakan untuk meningkatkan partisipasi.

3. *Context Setters (High Power, Low Interest)*

Yaitu *stakeholder* yang memiliki kekuasaan cukup besar, namun kepentingannya terhadap isu relatif rendah.

4. *Players (High Power, High Interest)*

Yaitu aktor strategis yang memiliki kekuasaan tinggi sekaligus kepentingan besar.

d. Strategi pengelolaan tiap kuadran

Menentukan pendekatan komunikasi dan keterlibatan yang sesuai untuk setiap kategori:

1. *Crowd (Low Power, Low Interest)*

Cukup dilakukan pemantauan (monitoring) secara periodik, tanpa harus mengalokasikan sumber daya manajerial yang berlebihan. Komunikasi bersifat informatif dan sederhana, misalnya melalui sosialisasi umum atau publikasi media massa.

2. *Subjects (Low Power, High Interest)*

Mereka perlu diberikan informasi yang rutin dan akurat agar tetap mendukung. Selain itu, dapat diberdayakan melalui forum partisipatif atau kelompok kerja sehingga suara mereka tetap tersalurkan. Dengan demikian,

walaupun tidak memiliki kekuasaan formal, mereka dapat menjadi sekutu strategis yang memperkuat legitimasi kebijakan.

3. *Context Setters (High Power, Low Interest)*

Penting untuk menjaga kepuasan mereka agar tidak menimbulkan resistensi. Pendekatan yang dilakukan adalah komunikasi selektif dengan menekankan aspek yang sesuai dengan agenda mereka, misalnya bagaimana.

4. *Players (High Power, High Interest)*

Harus dikelola secara dekat (*manage closely*) melalui komunikasi intensif, pelibatan langsung dalam pengambilan keputusan, dan kerjasama formal. Hubungan dengan kelompok ini tidak bisa bersifat parsial, tetapi harus terintegrasi dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi kebijakan.

Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran sistematis mengenai dinamika kepentingan dan relasi kekuasaan di sekitar Maliosewu. Hasil pemetaan ini penting untuk menjelaskan mengapa sering terjadi kesenjangan antara kebijakan formal dan praktik implementasi, serta untuk merumuskan strategi pelibatan *stakeholder* yang lebih inklusif, partisipatif, dan kolaboratif dalam mendukung keberlanjutan destinasi. Objek penelitian adalah kawasan wisata kuliner Maliosewu, yang berlokasi di sekitar Tugu Gajah, Pekon Bulukarto, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Maliosewu dipilih karena merupakan destinasi kuliner berbasis komunitas yang unik, lahir dari inisiatif daerah, berkembang pesat sebagai wadah UMKM, namun menghadapi dinamika kebijakan yang tidak menentu. Kondisi ini menjadikannya studi kasus yang relevan untuk ditelaah melalui *stakeholder mapping*, karena memperlihatkan bagaimana relasi antaraktor dapat menentukan arah kebijakan dan masa depan pengembangan pariwisata kuliner berbasis komunitas di tingkat daerah.

3.4. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui interaksi dengan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu. Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pengetahuan, pengalaman, serta

keterlibatan langsung dalam fenomena yang diteliti (Palinkas et al., 2015). Informan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (DISPORAPAR) Kabupaten Pringsewu, sebagai representasi pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan pariwisata.
2. Anggota DPRD Kabupaten Pringsewu (3 orang), sebagai unsur legislatif yang menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap kebijakan daerah, termasuk sektor pariwisata.
3. Pengelola Maliosewu (1 orang), sebagai aktor utama dalam operasional dan pengelolaan kawasan wisata kuliner
4. Pedagang (3 orang), yang dipilih untuk mewakili pelaku usaha kuliner yang terdampak langsung oleh kebijakan dan dinamika pengelolaan kawasan.
5. Masyarakat sekitar (3 orang), yang merasakan dampak sosial dan ekonomi dari keberadaan Maliosewu.
6. Pengunjung (3 orang), untuk menggambarkan persepsi, pengalaman, serta tingkat kepuasan terhadap destinasi wisata kuliner tersebut.

Jumlah informan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kebutuhan data di lapangan hingga informasi yang diperoleh dinilai telah memadai untuk menjawab fokus penelitian.

b. Data Sekunder

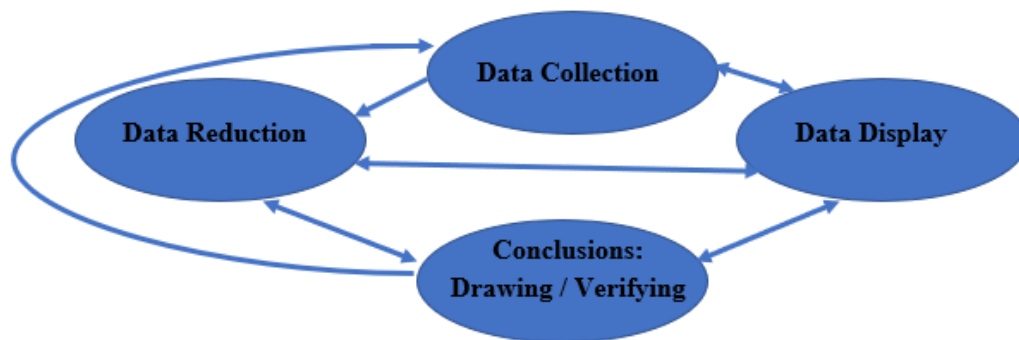
Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis dan resmi yang mendukung analisis penelitian, antara lain:

1. Dokumen kebijakan: Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARKAB) Pringsewu, Renstra, RPJMD, Peraturan Daerah, dan peraturan teknis terkait pariwisata dan UMKM.
2. Laporan instansi pemerintah: data dari BPS Kabupaten Pringsewu, Dinas Pariwisata, dan instansi terkait lainnya.
3. Literatur akademik: buku, jurnal, artikel ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu mengenai *stakeholder mapping*, pariwisata kuliner, dan pengembangan destinasi wisata kuliner.
4. Media massa dan publikasi daring: berita daerah dan nasional yang relevan dengan perkembangan serta isu-isu yang dihadapi Maliosewu.

Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap data primer untuk memperkuat analisis, memberikan gambaran kebijakan formal, serta menambah perspektif dari penelitian terdahulu terkait peran *stakeholder* dalam pengembangan destinasi wisata.

3.5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh proses analisis diarahkan untuk menjawab fokus penelitian, yaitu memetakan *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu berdasarkan tingkat kepentingan (*interest*), pengaruh (*power*), serta dinamika hubungan antaraktor.



Gambar 3. Model Analisis Interaktif Miles dan Huberman (1994),

Sumber: Miles & Huberman, 1994

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Pada tahap ini, data yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi diseleksi, dipilah, dan difokuskan pada informasi yang relevan dengan pemetaan *stakeholder*. Reduksi data dilakukan dengan mengelompokkan informasi ke dalam beberapa kategori utama, antara lain:

1. Identifikasi aktor-aktor yang terlibat dalam pengembangan Maliosewu;
2. Kepentingan masing-masing *stakeholder* terhadap keberlanjutan destinasi;
3. Tingkat pengaruh atau kekuasaan *stakeholder* dalam proses pengambilan dan implementasi kebijakan;

4. Bentuk relasi antar *stakeholder*, termasuk potensi konflik dan peluang kolaborasi.

Melalui proses ini, data mentah diolah menjadi kategori analisis awal yang berkaitan langsung dengan kepentingan dan pengaruh *stakeholder*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan dalam bentuk yang memudahkan peneliti untuk memahami pola dan hubungan antar *stakeholder*.

Penyajian data dilakukan melalui:

1. Matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholder*;
2. Pemetaan *stakeholder* ke dalam *Power–Interest Grid* berdasarkan *stakeholder mapping* model Eden dan Ackermann (1998) (dalam LAN, 2015), yang membagi aktor ke dalam empat kuadran, yaitu *crowd*, *subjects*, *context setters*, dan *players*;
3. Narasi deskriptif yang menjelaskan dinamika interaksi antaraktor, termasuk dukungan, resistensi, dan bentuk koordinasi yang terjadi dalam pengembangan Maliosewu.

Penyajian data ini memungkinkan peneliti untuk melihat secara sistematis posisi dan peran masing-masing *stakeholder* dalam konteks kebijakan.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap akhir analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pemetaan *stakeholder*. Kesimpulan difokuskan pada:

1. Identifikasi aktor kunci dalam pengembangan wisata kuliner Maliosewu;
2. Pola relasi kepentingan dan kekuasaan yang memengaruhi arah kebijakan; serta
3. Implikasi pemetaan *stakeholder* terhadap strategi pengelolaan dan pelibatan aktor dalam mendukung keberlanjutan destinasi.

Untuk menjamin validitas temuan, proses penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus dan diverifikasi melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, serta *member check* dengan informan kunci agar interpretasi peneliti sesuai dengan kondisi empiris di lapangan.

3.6. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data sangat penting untuk memastikan bahwa temuan penelitian dapat dipercaya (*trustworthiness*) dan dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Sugiyono (2019), terdapat empat kriteria utama yang digunakan untuk menguji keabsahan data, yaitu *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*.

a. *Credibility* (Validitas Internal)

Credibility berkaitan dengan sejauh mana hasil penelitian dapat dipercaya. Untuk menjaga *credibility*, penelitian ini menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Triangulasi sumber yaitu membandingkan informasi dari berbagai informan, seperti pemerintah daerah, pengelola Maliosewu, Pedagang, masyarakat dan pengunjung.
2. Triangulasi teknik yaitu memadukan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk melihat konsistensi data.
3. *Member check* yaitu mengonfirmasi hasil wawancara dan interpretasi peneliti kepada informan kunci agar sesuai dengan maksud yang sebenarnya.

b. *Transferability* (Validitas Eksternal)

Transferability menunjukkan sejauh mana hasil penelitian dapat diterapkan pada konteks lain. Dalam penelitian ini, peneliti mendeskripsikan secara rinci konteks Maliosewu, karakteristik *stakeholder*, serta kondisi sosial dan kebijakan yang melingkupinya. Dengan demikian, pembaca atau peneliti lain dapat menilai sejauh mana hasil penelitian ini dapat ditransfer ke kasus serupa, misalnya destinasi kuliner berbasis komunitas di daerah lain.

c. *Dependability* (Reliabilitas)

Dependability terkait dengan konsistensi hasil penelitian apabila proses yang sama dilakukan kembali. Untuk menjamin *dependability*, peneliti menyusun catatan lengkap mengenai proses penelitian, mulai dari perencanaan, pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan. Selain itu, peneliti melakukan *audit trail* dengan pembimbing untuk memastikan bahwa proses penelitian berjalan sesuai prosedur ilmiah.

d. *Confirmability* (Objektivitas)

Confirmability berkaitan dengan objektivitas hasil penelitian, yaitu sejauh mana temuan benar-benar berasal dari data, bukan dari bias atau kepentingan peneliti. Dalam penelitian ini, *confirmability* dijaga dengan menyertakan bukti-bukti lapangan (kutipan wawancara, catatan observasi, dokumen) dan melakukan diskusi dengan pembimbing serta sejawat akademik untuk mengurangi subjektivitas peneliti.

Dengan mengacu pada empat kriteria keabsahan data tersebut, penelitian ini diharapkan menghasilkan temuan yang kredibel, dapat ditransfer ke konteks serupa, konsisten dalam proses, dan objektif dalam hasil.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Stakeholder mapping dalam pengembangan Wisata Kuliner Maliosewu dilakukan melalui empat tahapan analisis. Tahap pertama adalah identifikasi *stakeholder*, yang menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan melibatkan beberapa aktor utama, yaitu DISPORAPAR Kabupaten Pringsewu, DPRD Kabupaten Pringsewu, pengelola Maliosewu, pedagang/UMKM, masyarakat sekitar, dan pengunjung. Aktor-aktor tersebut memiliki peran dan kepentingan yang berbeda terhadap keberlangsungan kawasan wisata kuliner.

Tahap kedua adalah penilaian tingkat pengaruh (*power*) dan kepentingan (*interest*) masing-masing *stakeholder*. Hasil penilaian menunjukkan bahwa DISPORAPAR memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi karena kewenangan formal dalam pengelolaan pariwisata daerah. DPRD memiliki kekuatan kelembagaan yang besar melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, namun tingkat kepentingannya terhadap pengelolaan Maliosewu belum terbangun secara konsisten. Sementara itu, pengelola Maliosewu, pedagang/UMKM, dan masyarakat sekitar memiliki kepentingan yang sangat tinggi karena bergantung langsung pada aktivitas ekonomi kawasan, tetapi daya pengaruhnya masih terbatas. Pengunjung memiliki pengaruh dan kepentingan yang relatif rendah serta keterlibatan yang bersifat insidental.

Tahap ketiga adalah pemetaan *stakeholder* menggunakan model *Power–Interest Grid*. Hasil pemetaan menunjukkan bahwa DISPORAPAR berada pada kuadran *players (high power–high interest)*, DPRD berada pada kuadran *context setters (high power–low interest)*, pengelola Maliosewu, pedagang/UMKM, dan masyarakat berada pada kuadran *subjects (low power–high interest)*, sedangkan pengunjung berada pada kuadran *crowd (low power–low interest)*. Pemetaan ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan dan kepentingan antaraktor dalam pengelolaan kawasan.

Tahap keempat adalah perumusan strategi pengelolaan *stakeholder* berdasarkan posisi kuadran. Strategi yang diperlukan yaitu menjaga keterlibatan aktor *players* melalui koordinasi yang lebih kolaboratif, meningkatkan perhatian aktor *context setters* terhadap isu pengelolaan kawasan, memperkuat kapasitas dan partisipasi aktor *subjects* agar aspirasinya lebih terakomodasi dalam pengambilan keputusan, serta melakukan pemantauan terhadap aktor *crowd* sebagai pengguna kawasan yang berkontribusi pada dinamika aktivitas ekonomi. Melalui strategi tersebut, pengelolaan Wisata Kuliner Maliosewu diharapkan dapat berkembang secara lebih inklusif dan berkelanjutan

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai *stakeholder mapping* dalam pengembangan Wisata Kuliner Maliosewu, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai berikut:

1. Pelembagaan mekanisme konsultasi wajib dalam keputusan strategis.
Setiap kebijakan relokasi, penataan ruang, atau perubahan fungsi kawasan perlu didahului konsultasi formal yang melibatkan DISPORAPAR, DPRD, pengelola, dan perwakilan pedagang agar keputusan tidak bersifat sepihak serta mampu meredam potensi konflik antara aktor *high power* dan *high interest*.
2. Penegasan legalitas dan kepastian status kawasan Maliosewu dan Terasewu.
Pemerintah daerah perlu mengevaluasi dan menetapkan dasar hukum yang jelas bagi kedua kawasan agar tidak terjadi dualisme kebijakan, ketidakpastian usaha, dan konflik tata ruang akibat aktivitas yang berjalan tanpa legitimasi yang setara.
3. Pembentukan forum koordinasi antara Maliosewu–Terasewu–Pemerintah Daerah.
Forum ini berfungsi sebagai ruang mediasi dan sinkronisasi kebijakan guna mencari jalan tengah antara kepentingan ekonomi lokal dan kepatuhan terhadap tata ruang, sehingga Maliosewu tetap beroperasi tanpa mengabaikan kepentingan regulatif pemerintah.

4. Penataan operasional berbasis prinsip tata ruang dan ketertiban umum.
Penetapan standar jam operasional, tata letak lapak, serta evaluasi dampak kebersihan dan lalu lintas diperlukan sebagai bentuk kompromi antara fungsi trotoar sebagai ruang publik dan fungsi ekonomi sebagai ruang usaha.
5. Penguatan transparansi dalam proses pengambilan keputusan.
Setiap kebijakan terkait relokasi, izin, dan penataan kawasan perlu dikomunikasikan dan didokumentasikan secara terbuka untuk menjaga legitimasi pemerintah daerah serta mencegah konflik sosial di tingkat pelaku usaha dan masyarakat sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Birkland, T. A. (2019). *An introduction to the policy process: Theories, concepts, and models of public policy making*. Routledge.
- Bovens, M., Goodin, R. E., & Schillemans, T. (2018). *The Oxford handbook of public accountability*. Oxford University Press.
- Bryman, A. (2016). *Social research methods*. Oxford university press.
- Bryson, J. M. (2018). *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement*. John Wiley & Sons.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. SAGE Publications.
- Freeman, R. E. (2010). *Strategic management: A stakeholder approach*. Cambridge university press.
- Gnanapala, A. C. (2017). *Destination marketing approaches for wildlife tourism. In Wilderness of wildlife tourism* (pp. 35-59). Apple Academic Press.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*.
- Hill, M., & Hupe, P. (2021). *Implementing public policy: An introduction to the study of operational governance*.
- Howlett, M., Ramesh, M., & Perl, A. (2020). *Studying public policy: Policy cycles and policy subsystems (4th ed.)*. Oxford University Press.
- Inkson, C., & Minnaert, L. (2022). *Tourism management: an introduction*. Sage.
- Johnson, G., Scholes, K., & Whittington, R. (2008). *Exploring corporate strategy: Text and cases (8th ed.)*. Pearson Education.
- Khamim, M. (2021). *Peran DPRD Dalam Mewujudkan Good Governance Di Daerah*. Penerbit Nem.
- Lembaga Administrasi Negara. (2015). *Modul pelatihan analis kebijakan*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- OECD. (2020). *Tourism Policy Responses to the COVID-19 Pandemic*. OECD Publishing.
- Ostrom, E. (2015). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.
- Rhodes, R. A. (1997). *Understanding governance: Policy networks, governance, reflexivity and accountability*. Open University.
- Saarinen, J. (2019). *Communities and sustainable tourism development: Community impacts and local benefit creation in tourism. In A research agenda for sustainable tourism* (pp. 206-222). Edward Elgar Publishing.
- Suaib, H., Rakia, A. S. R., Purnomo, A., & Ohorella, H. M. (2022). *Pengantar kebijakan publik*. Humanities Genius.
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations World Tourism Organization (UNWTO). (2018). *Tourism for development Volume I: Key areas for action*.
- Wahab, S. A. (2021). *Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik*. Bumi Aksara.

Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods (6th ed.)*. SAGE Publications.

Jurnal dan Penelitian

- Adianti, S. Y. (2020). Perencanaan Tata Ruang sebagai Upaya Mewujudkan Pembangunan Kota Berkelanjutan (Studi Analisis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Mojokerto). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 6(1), 108-117. <https://jiap.ub.ac.id/index.php/jiap/article/view/1087>
- Adib, M., Zhang, X., AA Zaid, M., & Sahyouni, A. (2021). Management control system for corporate social responsibility implementation—a stakeholder perspective. *Corporate Governance: The International Journal of Business in Society*, 21(3), 410-432. <https://doi.org/10.1108/CG-02-2020-0063>
- Afni, I. N., Pramono, R., & Haryanto, S. (2022). Stakeholder mapping dalam pelaksanaan community tourism collaborative governance (CTCG) di Desa Maron Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 26(1), 77–92. <https://jurnal.ugm.ac.id/jsp/article/view/74131>
- Atmajaya, R., Hasan, N., Handayani, L., Rifa'i, M. I., & Xavier, U. (2025). Stakeholder Mapping Analysis of Organic Agriculture Development: A Power-Interest Grid Approach (Case Study of Karanganyar Regency, Central Java Province, Indonesia). In *E3S Web of Conferences (Vol. 665, p. 01022)*. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202566501022>
- Bichler, B. F., & Lösch, M. (2019). Collaborative governance in tourism: Empirical insights into a community-oriented destination. *Sustainability*, 11(23), 6673. <https://doi.org/10.3390/su11236673>
- Bramwell, B., Higham, J., Lane, B., & Miller, G. (2017). Twenty-five years of sustainable tourism and the Journal of Sustainable Tourism: Looking back and moving forward. *Journal of Sustainable Tourism*, 25(1), 1-9. <https://doi.org/10.1080/09669582.2016.1252714>
- Conceição, C. C., Dos Anjos, F. A., & Gadotti dos Anjos, S. J. (2019). Power relationship in the governance of regional tourism organizations in Brazil. *Sustainability*, 11(11), 3062. <https://doi.org/10.3390/su11113062>
- da Costa, D. F. A. S., da Costa Nogueira, G., Fabiano, L., da Silva Santos, L. M., Braga, I. L., & dos Santos Arenas, M. V. (2025). STAKEHOLDER THEORY APPLIED TO PUBLIC ADMINISTRATION: BIBLIOMETRIC STUDY OF INTERNATIONAL SCIENTIFIC PRODUCTION WITH EMPHASIS ON BRAZILIAN CONTRIBUTION. *Revista de Gestão Social e Ambiental*, 19(6), 1-20. <https://doi.org/10.24857/rgsa.v19n6-040>
- Darma Putra, I. N. (2014). Empat Srikandi Kuliner Bali: Peran Perempuan Dalam Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan. *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, 1, 65-94. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jumpa/article/view/11037>
- Dredge, D., & Jamal, T. (2015). Progress in tourism planning and policy: A post-structural perspective on knowledge production. *Tourism Management*, 51, 285–297. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.02.002>
- Enqvist, J. P., Campbell, L. K., Stedman, R. C., & Svendsen, E. S. (2019). Place meanings on the urban waterfront: a typology of stewardships. *Sustainability Science*, 14(3), 589-605. <https://doi.org/10.1007/s11625-018-0601-8>
- Eshuis, J., & Edwards, A. (2017). Branding the city: The democratic legitimacy of a new mode of governance. *Urban Studies*, 54(7), 1577–1592. <https://doi.org/10.1177/0042098015624871>
- Fadilla, H. (2024). Pengembangan sektor pariwisata untuk meningkatkan pendapatan daerah di Indonesia. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 36-43. <https://doi.org/10.70437/benefit.v2i1.375>

- Farsari, I. (2023). Exploring the nexus between sustainable tourism governance, resilience and complexity research. *Tourism Recreation Research*, 48(3), 352-367. <https://doi.org/10.1080/02508281.2022.2142347>
- Fitriyani, N. (2025). Peran Wisata Kuliner Dalam Pertumbuhan Ekonomi Di Destinasi Pariwisata Demak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(1), 484-493. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i1.3739>
- Gnes, D., & Vermeulen, F. (2019). Non-governmental organisations and legitimacy: authority, power and resources. *Journal of Migration History*, 5(2), 218-247. <https://doi.org/10.1163/23519924-00502003>
- Handini, N., Darwina, M., & Pangestoeti, W. (2025). Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal melalui inovasi kebijakan pembangunan berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Nusantara*, 2(5), 964-986. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5793>
- Harcourt, B. E. (2018). The systems fallacy: a genealogy and critique of public policy and cost-benefit analysis. *The Journal of Legal Studies*, 47(2), 419-447. <https://doi.org/10.1086/697326>
- Hartman, S. (2023). Destination governance in times of change: a complex adaptive systems perspective to improve tourism destination development. *Journal of Tourism Futures*, 9(2), 267-278. <https://doi.org/10.1108/JTF-06-2022-0154>
- Head, B. W. (2022). Policy design and evidence-based policymaking. *Public Administration Review*, 82(1), 3–14. <https://doi.org/10.1111/puar.13464>
- Higgins-Desbiolles, F. (2020). The “war over tourism”: Challenges to sustainable tourism in the tourism academy after COVID-19. *Journal of Sustainable Tourism*, 29(4), 551-569. <https://doi.org/10.1080/09669582.2020.1746245>
- Hu, Y., & Xu, S. (2023). Repeat tourists’ perceived unfavorable changes and their effects on destination loyalty. *Tourism Review*, 78(1), 42-57. <https://doi.org/10.1108/TR-07-2022-0347>
- Ishak, N., & Hos, J. (2025). Dinamika Kelembagaan Lokal dan Partisipasi Warga dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Komunitas. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 58-70. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.96>
- Keping, Y. (2018). Governance and good governance: A new framework for political analysis. *Fudan Journal of the Humanities and Social Sciences*, 11(1), 1-8. <https://doi.org/10.1007/s40647-017-0196-4>
- Khan, M. R., Khan, H. U. R., Lim, C. K., Tan, K. L., & Ahmed, M. F. (2021). Sustainable tourism policy, destination management and sustainable tourism development: A moderated-mediation model. *Sustainability*, 13(21), 12156. <https://doi.org/10.3390/su132112156>
- Khater, M., Ibrahim, O., Sayed, M. N. E., & Faik, M. (2025). Legal frameworks for sustainable tourism: Balancing environmental conservation and economic development. *Current Issues in Tourism*, 28(22), 3693-3714. <https://doi.org/10.1080/13683500.2024.2342106>
- Kujala, J., Sachs, S., Leinonen, H., Heikkinen, A., & Laude, D. (2022). Stakeholder engagement: Past, present, and future. *Business & Society*, 61(5), 1136-1196. <https://doi.org/10.1177/00076503211066595>
- Kurniawan, T., & Prasjo, E. (2018). Coordination challenges in decentralised governance: Evidence from Indonesia. *Policy Studies*, 39(3), 288–304. <https://doi.org/10.1080/01442872.2017.1412281>
- Lee, S., Lee, N., Lee, T. J., & Hyun, S. S. (2024). The influence of social support from intermediary organizations on innovativeness and subjective happiness in community-based tourism. *Journal of Sustainable Tourism*, 32(4), 795-817. <https://doi.org/10.1080/09669582.2023.2253454>

- Lentari, S. (2024). Evidence-Based Policy Making: Penggunaan Bukti Untuk Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Timur. *Publikauma: Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 12(1). <https://doi.org/10.31289/publika.v12i1.11648>
- Lenz, T., & Burilkov, A. (2017). Institutional pioneers in world politics: Regional institution building and the influence of the European Union. *European Journal of International Relations*, 23(3), 654-680. <https://doi.org/10.1177/1354066116652376>
- Lubis, H., Dwi, L., & Ikram, M. (2025). Dinamika Intervensi Politik dalam Pembentukan Regulasi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Dakwah Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://ilmadika.org/index.php/jurnalmahasiswa2/article/view/35/16>
- Martínez-Peláez, R., Ochoa-Brust, A., Rivera, S., Félix, V. G., Ostos, R., Brito, H., ... & Mena, L. J. (2023). Role of digital transformation for achieving sustainability: mediated role of stakeholders, key capabilities, and technology. *Sustainability*, 15(14), 11221. <https://doi.org/10.3390/su151411221>
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa â€œBumiaji Agrotourismâ€ di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 7(1), 20-29. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>
- Hutapea, R. B., Rahmafitria, F., Nurazizah, G. R., & Pratama, A. R. (2024). Identifikasi Partisipasi Masyarakat Desa Wisata Alam Endah sebagai Modal Pengembangan Pariwisata di Ciwidey, Kabupaten Bandung. *Jurnal Abdimas Pariwisata*, 5(2), 16-22. <https://doi.org/10.36276/jap.v5i2.631>
- Nasib, W. J., Aulia, M. R., Harahap, A. R., & Lubis, A. (2023). The Role of Destination Image in Building Coffee Business Development in Central Aceh through Tourism Packages, Attraction, and Tourist Consciousness. *Journal of Hunan University Natural Sciences*, 50(6). <https://doi.org/10.55463/issn.1674-2974.50.6.5>
- Nederhand, J., & Klijn, E. H. (2019). Stakeholder involvement in public-private partnerships: Its influence on the innovative character of projects and on project performance. *Administration & Society*, 51(8), 1200-1226. <https://doi.org/10.1177/0095399718786171>
- Nunkoo, R. (2017). Governance and sustainable tourism: What is the role of trust, power and social capital? *Journal of Destination Marketing & Management*, 6(4), 277-285. <https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2016.11.003>
- Nunkoo, R., & Ramkissoon, H. (2016). Stakeholders' views of enclave tourism: A grounded theory approach. *Journal of Hospitality & Tourism Research*, 40(5), 557-558. <https://doi.org/10.1177/1096348013491597>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and policy in mental health and mental health services research*, 42(5), 533-544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Permana, D. (2024). Implementation of Public Policy to Achieve Sustainable Development: Challenges and Strategies. *Khazanah Sosial*, 6(1), 49-59. <https://doi.org/10.15575/ks.v6i1.33522>
- Pitana, I. G., & Putra, I. G. S. A. (2013). Pariwisata sebagai Wahana Pelestarian Subak, dan Budaya Subak Sebagai Modal Dasar dalam Pariwisata. *Jurnal Kajian Bali*, 3(2), 159-180. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15679>
- Putri, A. M. T., Purnamasari, H., & Rizki, M. F. (2025). Pengalaman Aktor-Aktor Pemerintahan Dalam Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Karawang. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5940-5954. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2198>

- Rahayu, S., Diatmika, I. P. G., & Haryadi, W. (2022). Analisis potensi wisata kuliner dalam mendukung perekonomian umkm pesisir saliper ate di kabupaten sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 5(1), 01-08. <https://doi.org/10.58406/jrktl.v5i1.954>
- Reed, M. S., Vella, S., Challies, E., De Vente, J., Frewer, L., Hohenwallner-Ries, D., ... & Van Delden, H. (2018). A theory of participation: what makes stakeholder and public engagement in environmental management work?. *Restoration ecology*, 26, S7-S17. <https://doi.org/10.1111/rec.12541>
- Richards, G. (2018). Cultural tourism: A review of recent research and trends. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 36, 12–21. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2018.03.005>
- Richter, U. H., & Dow, K. E. (2017). Stakeholder theory: A deliberative perspective. *Business Ethics: A European Review*, 26(4), 428-442. <https://doi.org/10.1111/beer.12148>
- Rodríguez-Pose, A., & Wilkie, C. (2019). Innovative policies for local development. *Regional Studies*, 53(2), 300–315. <https://doi.org/10.1080/00343404.2018.1462484>
- Saito, H., & Ruhanen, L. (2017). Power in tourism stakeholder collaborations: Power types and power holders. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 189-196. <https://doi.org/10.1016/j.jhtm.2017.03.001>
- Sentanu, I. G. E. P. S., & Mahadiansar, M. (2020). Memperkuat peran pemerintah daerah: Mengelola pariwisata lokal yang berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (JUAN)*, 8(1), 1-20. <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/juan/article/view/2235>
- Stone, M. T. (2018). Community-based tourism enterprises: challenges and prospects for community participation. *Journal of Sustainable Tourism*, 26(8), 1267-1285. <https://doi.org/10.1080/09669582.2017.1310663>
- Suharsono, S., Nugroho, A. A., Harrison, A., & Singgalen, Y. A. (2023). PERAN PEREMPUAN DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA BERBASIS KOMUNITAS DAN MODAL SOSIAL (STUDI KASUS DI DESA WISATA LUGUSARI KABUPATEN PRINGSEWU LAMPUNG). *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 1(3), 11-19. <https://journal.untar.ac.id/index.php/serina/article/view/23661>
- Suhel, S., & Bashir, A. (2018). The role of tourism toward economic growth in the local economy. *Economic Journal of Emerging Markets*, 32-39. <https://doi.org/10.20885/ejem.vol10.iss1.art4>
- Sutiyo, & Maharjan, K. L. (2017). Decentralization and rural development in Indonesia. Singapore: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-10-3208-0>
- Tambunan, T. (2019). Development of micro, small and medium enterprises in a developing country: The Indonesian case. *Journal of Enterprising Communities*, 13(1–2), 1–20. <https://doi.org/10.1108/JEC-10-2018-0067>
- Tarigan, A. H., & Huda, K. (2025). Kebijakan Publik dan Kebijakan Sosial dalam Ilmu Politik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(4), 1662-1668. <https://doi.org/10.63822/48ytw906>
- Tasci, A. D. A., Semrad, K. J., & Yilmaz, S. S. (2019). Community-based tourism: Finding the equilibrium in empowering hosts and enlightening guests. *Journal of Sustainable Tourism*, 27(6), 952–971. <https://doi.org/10.1080/09669582.2018.1560458>
- Tovmasyan, G. (2019). Exploring the role of gastronomy in tourism. [https://doi.org/10.21272/sec.3\(3\).30-39.2019](https://doi.org/10.21272/sec.3(3).30-39.2019)
- Utami, A. T. (2025). Integrasi Pasar Rakyat dengan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Model Kebijakan Strategis untuk Revitalisasi Ekonomi Lokal. *PAMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 5(1), 1-18. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v5i1.99>

- Vasstrøm, M., & Normann, R. (2019). The role of local government in rural communities: culture-based development strategies. *Local Government Studies*, 45(6), 848-868. <https://doi.org/10.1080/03003930.2018.1558237>
- White, M., & Langenheim, N. (2021). A ladder-truss of citizen participation: re-imagining Arnstein's ladder to bridge between the community and sustainable urban design outcomes. *Journal of Design Research*, 19(1-3), 155-183. <https://doi.org/10.1504/JDR.2021.121067>
- Wiati, C. B., Indriyanti, S. Y., & Maharani, R. (2018, April). Conflict Resolution Efforts through Stakeholder Mapping in Labanan Research Forest, Berau, East Kalimantan, Indonesia. In IOP Conference Series: *Earth and Environmental Science* (Vol. 144, No. 1, p. 012063). IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/144/1/012063>
- Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism management*, 78, 104024. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024>
- Wulandari, S. N. (2021). Tourism development policy and their impact on the regional economy in the Riau Islands Province. *Jurnal Bina Praja*, 13(2), 293-305. <https://doi.org/10.21787/jbp.13.2021.293-305>
- Zhang, Y., Xu, H., Li, J., & Wang, L. (2024). Factors influencing the sustainability of food tourism destinations: Evidence from the World Heritage Site of Guilin. *Sustainability*, 16(3), 1450. <https://doi.org/10.3390/su16031450>

Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 04 Tahun 2016 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima
- Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2020–2025 (RIPPARKAB).
- Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata

Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Pringsewu. (2025). *Kabupaten Pringsewu dalam Angka 2025*. Data Objek Wisata dan Kunjungan Wisatawan. Diakses melalui <https://pringsewukab.bps.go.id/id/publication/2025/02/28/92289dcccc7d51700b126fc9/kabupaten-pringsewu-dalam-angka-2025.html>
- Haluan Lampung. (2023). Wisata Kuliner Maliosewu Kabupaten Pringsewu Resmi Dibuka. <https://haluanlampung.com/2023/12/wisata-kuliner-maliosewu-pringsewu-resmi-dibuka/>
- Radar Lampung. (2024, Januari 10). Bupati Pringsewu Fokuskan Pembangunan UMKM dan Infrastruktur Daerah. <https://radarlampung.bacakoran.co/>
- RRI. (2024, Januari 1). Maliosewu, Malioboro-nya Pringsewu Resmi Dibuka. <https://www.rri.co.id/umkm/498306/maliosewu-malioboro-nya-pringsewu-resmi-dibuka>
- Suwignyo, A. (2024, Januari 7). Perkuat Ekonomi Kerakyatan, Dorong Pengembangan UMKM Pringsewu Melalui Maliosewu. Radar Lampung. <https://radarlampung.bacakoran.co/read/3064/perkuat-ekonomi-kerakyatan-dorong-pengembangan-umkm-pringsewu-melalui-maliosewu>